



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang	:	2023 – 2024
Masa Persidangan	:	I
Rapat ke-	:	Ke – 7
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	Sekretaris Jenderal BPK RI, Kepala BPKP, Kepala BPS dan Kepala LKPP
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Kamis, 31 Agustus 2023
Waktu	:	Pukul 14.00 s.d. 16.45 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Ketua Rapat	:	1. Drs. Fathan (Wk. Ketua/F-PKB) 2. Dr. H. M. Amir Uskara, M.Kes. (Wk. Ketua/F-PPP)
Sekretaris Rapat	:	Dr. Anita Handayaniputri, S.T., M.T. (Kabag Setkom XI)
Acara	:	Pembahasan Laporan Keuangan Tahun 2022
Hadir	:	A. Anggota DPR RI : 28 dari 53 orang Anggota Komisi XI DPR RI dengan rincian:

PIMPINAN

3 orang dari 5 orang Pimpinan:

1. Dr. Achmad Hatari, S.E., M.Si. (Wk Ketua/F – P. Nasdem)
2. Drs. Fathan (Wk Ketua/F – PKB)
3. Dr. H. M. Amir Uskara, M.Kes. (Wk. Ketua/F – PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

7 orang dari 11 orang Anggota:

1. Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM
2. Marsiaman Saragih
3. Ir. Eriko Sotadurga B. P. S.
4. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
5. Indah Kurnia
6. Dr. Sihar P. H. Sitorus, BSBA, MBA
7. I. G. A. Rai Wirajaya, SE., MM

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Puteri Anetta Komaudin, B.Com.
2. H. Mukhamad Misbakhun, SE., M.H
3. H. Muhidin Mohammad Said, SE., M.B.A

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. H. Gus Irawan Pasaribu, SE,AK,MM,CA
2. Ir. H. Kamrussamad, S.T., M.Si
3. DR. H. Jefry Romdonny, SE., S.Sos., M.Si, MM
4. R. Imron Amin, SH, MH.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Fauzi Amro, M.Si
2. Satori, S.Pdl., MM
3. H. Charles Meikyansah

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Bertu Merlas, ST

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Didi Irawadi Syamsuddin, SH., LLM
2. Hj. Siti Mufattahah, P.Si., M.B.A.
3. Harmusa Oktaviani

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

3 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H. Hidayatullah, SE
2. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si
3. H. Ecky Awal Mucharam

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

0 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

--

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. Dra. Hj. Wartiah, M.Pd.

B. Undangan:

1. Sekjen BPK RI (Dr. Bahtiar Arif, S.E.)
2. Kepala LKPP (Hendrar Prihadi).
3. Plt. Kepala BPS (Amalia Adininggar Widiasanti)
4. Sestama BPKP (Dr. Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak.)

Beserta jajaran

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-PKB (Drs. FATHAN):

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Sekjen BPK beserta jajarannya,
Yang terhormat Plt. Kepala BPS beserta jajarannya,
Yang terhormat Kepala LKPP beserta jajarannya,
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI, serta
Para Hadirin yang berbahagia,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi XI, Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Sekjen BPK, Plt. Kepala BPS dan Kepala LKPP akan dihadiri dan telah menandatangani sebanyak 25, izin 1, dari 8 fraksi, dengan demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 279 dan 281 telah terpenuhi. Untuk itu dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, izinkanlah kami membuka RDP pada siang hari ini dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Mengawali RDP pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, atas rahmat dan hidayah-Nya pada hari ini kita semua bisa menghadiri acara yang sangat bermanfaat ini.

Agenda rapat pada hari ini adalah pembahasan Laporan BPK BPS, LKPP dan BPKP dalam APBN Tahun Anggaran 2022. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa, "Menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya". Dalam rangka melaksanakan undang-undang tersebut, pada hari ini kita akan membahas Laporan Keuangan BPK, BPS, LKPP, dan BPKP Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya saya persilakan Sekjen BPK, Plt. BPS, dan Kepala LKPP, silakan Pak.

SEKJEN BPK RI (Dr. BAHTIAR ARIF, S.E.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Bapak-bapak Pimpinan,
Yang terhormat Bapak-Ibu Anggota Komisi XI DPR RI,
Yang terhormat Bapak-Ibu Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga yang hadir, Kepala LKPP, Kepala BPS, Kepala BPKP, dan
Yang terhormat Bapak-Ibu para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian Negara/Lembaga yang hadir pada rapat dengan pendapat pada hari ini,
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,

Perkenan kami menyampaikan Laporan Pembahasan Laporan Keuangan BPK Tahun 2022 Sebagai Pertanggungjawaban Anggaran BPK Tahun 2022 dengan beberapa agenda dan mohon izin kami juga didampingi oleh Bapak-bapak para Auditor Utama dan juga Kepala Direktorat Utama, para Pejabat Eselon I dan Eselon II terkait di BPK.

F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Pimpinan interupsi.

Kalau bisa tolong diperkenalkan Pak jadi tahu.

KETUA RAPAT:

Lengkap, lengkap ini.

SEKJEN BPK RI (Dr. BAHTIAR ARIF, S.E.):

Ya dari Auditor Utama kami ada Auditor Utama Keuangan Negara II Bapak Nelson Ambarita, Pak Nelson Ambarita, yang membidangi pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat Pak, termasuk laporan keuangan kementerian negara/lembaga di lingkungan bidang keuangan, di bawah Pak Daniel Lumban Tobing. Siap, supaya lebih jelas. Kemudian yang kedua, Auditor Utama Ketiga, Pak Ahmad Adit Santoso yang juga melakukan pemeriksaan di bidang lembaga negara dan bidang kesejahteraan kementerian negara, termasuk pengawasan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan juga, termasuk DPR.

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (Dr. H. M. AMIR USKARA, M.Kes./F-PPP):

Memeriksa, memeriksa BPK juga?

SEKJEN BPK RI (Dr. BAHTIAR ARIF, S.E.):

Iya, termasuk, lembaga negara, semua lembaga negara, siap, siap.

Kemudian juga dihadiri oleh beberapa Eselon I, Pak Anang Hernadi, beliau Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. Kemudian Pak Dwita Pradana, beliau Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan

Keuangan Negara. Yang lain adalah pejabat para Pejabat Eselon II. Terima kasih Pak Andreas.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,

Perkenankan kami menyampaikan beberapa hal mengenai Laporan Keuangan Tahun 2022 BPK RI, yang terdiri dari: pendahuluan; capaian kinerja; laporan keuangan, dan pemeriksaan laporan keuangan BPK; serta penutup.

Pada *slide* berikutnya kami menyampaikan bahwa pemeriksaan laporan keuangan BPK ini didasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik dan akuntan publik yang dimaksud adalah ditunjuk oleh DPR dan kemudian akuntan publik tersebut diusulkan oleh BPK dan Kementerian Keuangan dan hasil pemeriksaan disampaikan kepada DPR RI.

Kemudian kami juga sampaikan bahwa Laporan Keuangan BPK telah selesai diperiksa oleh kantor akuntan publik yang telah ditunjuk oleh DPR, Wisnu Karsono dan Rekan dan selanjutnya akan kami sampaikan juga capaian kinerja BPK tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang telah menghasilkan 3.665 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.

Selanjutnya juga kami sampaikan pada *slide* berikutnya, dari hasil pemeriksaan tersebut disampaikan rekomendasi dari tahun 2005 sampai tahun 2022 dan dari rekomendasi yang telah disampaikan kepada entitas yang diperiksa BPK, 77,3% telah selesai sesuai rekomendasi dan telah ditindaklanjuti tapi belum sesuai rekomendasi sebanyak 16,9%, belum ditindaklanjuti 4,7%, dan ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti 1,1%.

Selanjutnya kami juga menyampaikan bahwa sebagai bagian dari tugas BPK untuk memantau penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah, pada periode 2005 sampai dengan 2022 hasil monitoring BPK atas penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah menunjukkan 54% telah dilunasi, 37% masih sisa, dan 7% dalam proses angsuran dan ada 2% yang dilakukan penghapusan terhadap kerugian negara/daerah tersebut, dengan total nilai yang dipantau 4,93 triliun.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR,

Kami sampaikan juga untuk kinerja anggaran BPK tahun 2022, anggaran BPK tahun 2022 adalah sebesar 4 triliun dengan pembagian program pemeriksaan keuangan negara banyak 99% atau 3,3 triliun dan untuk program dukungan manajemen 658 miliar, sehingga secara total serapan anggaran tahun 2022 adalah 99,66%, dan ini mendapatkan penghargaan predikat tertinggi penyerapan anggaran dari pemerintah 99,66%

dan ini juga capaian serapan tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 99,6%, dan juga mendapat nilai evaluasi kinerja anggaran dan nilai kinerja anggaran BPK 95,93 dan mendapatkan penghargaan peringkat kedua dalam kategori anggaran pagu sedang.

Selanjutnya capaian kinerja BPK terkait dengan indikator kinerja utama. Pertama, tingkat kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK telah tercapai 77,48% dari target 76%. Kemudian indeks kepuasan pemangku kepentingan atas manfaat hasil pemeriksaan tercapai juga 4,31 dari 4,3, dan juga kemudian nilai *quality assurance* reformasi birokrasi dari Kementerian PAN-RB memperoleh predikat A atau 89,26% dari target 88,2.

Selanjutnya juga kami ingin menginformasikan capaian kinerja berikutnya di tingkat nasional maupun internasional. BPK terpilih sebagai Ketua United Nations Panel of External Auditor jadi Ketua Panel Auditornya Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2022 dan 2023, juga menginisiasi pembentukan BPK G20 atau SAI20 dan juga mendapatkan tambahan predikat wilayah bersih birokrasi bersih dan melayani dan WBK (wilayah bebas korupsi) dalam zona integritas yaitu 4 satuan kerja, juga penghargaan keterbukaan informasi dan untuk laporan keuangan telah diberikan opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 15 kali berturut-turut serta penghargaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional terbaik tahun 2022 untuk kategori lembaga negara, dan juga penghargaan Anugerah Meritokrasi dengan kategori sangat baik dan penghargaan evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik tahun 2002 dan BMN Barang Milik Negara Award serta sertifikasi ISO untuk *information security management system* dalam *data center*, operasi data center.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,

Untuk Laporan Keuangan BPK RI, laporan realisasi anggaran sampai dengan periode 31 Desember tahun 2022, pendapatan BPK sebesar 29 miliar dan lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan, karena adanya tambahan pendapatan dari layanan pendidikan dan pelatihan jasa penyelenggaraan pendidikan untuk instansi-instansi di luar BPK, dalam hal ini inspektorat baik pusat maupun daerah, dan juga jasa penggunaan *assessment center* yang dimiliki oleh BPK oleh kementerian negara/lembaga, serta jasa penggunaan sarana prasarana.

Dan untuk belanja BPK, realisasi 3,98 triliun dari anggaran 4 triliun atau 99,6% sehingga total kenaikan realisasi belanja disebabkan oleh belanja pegawai, karena ada dua hal yaitu kenaikan tingkat atau *grade* jabatan dari peralihan jabatan pelaksana menjadi jabatan fungsional, banyak pegawai yang mengalihkan jabatan pelaksana ke jabatan fungsional. Kemudian untuk pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil.

Dan untuk neraca, kami sampaikan total aset tahun 2022 adalah 8,8 triliun dan kewajiban 18 miliar, kenaikan disebabkan oleh aset tetap karena adanya pencatatan aset yang selama ini belum tercatat di aplikasi Sakti dan

kenaikan kewajiban karena adanya utang kepada pihak ketiga yaitu belanja pegawai karena kenaikan jenjang jabatan yang masih belum dibayar dan juga penurunan aset lancar karena penurunan belanja dibayar di muka dan piutang bukan pajak yang sudah dilunasi. Demikian juga penurunan piutang jangka panjang karena adanya pelunasan piutang.

Demikian juga pada *slide* berikutnya kami laporkan mengenai laporan operasional, adanya kenaikan defisit laporan operasional karena adanya peningkatan beban dari belanja pegawai yang telah kami sebutkan tadi.

Pada *slide* berikutnya kami menyampaikan juga perubahan ekuitas karena adanya perubahan kenaikan belanja pendapatan dan juga adanya belanja pendapatan dan belanja yang ada di dalam laporan operasional, maka berpengaruh terhadap perubahan ekuitas yang dipengaruhi oleh koreksi nilai aset tetap dan juga aset lainnya serta koreksi lain-lain berupa koreksi arus kas, pendapatan, beban piutang, dan utang.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,

Perlu kami sampaikan pada *slide* berikutnya, sesuai dengan kami sampaikan sebelumnya bahwa yang memeriksa laporan keuangan BPK adalah Kantor Akuntan Publik Wisnu Karsono dan Suwito dan Rekan yang telah ditetapkan oleh DPR berdasarkan Keputusan DPR Nomor 2 Tahun 2022/2023, tanggal 7 Februari 2023 dan pemeriksaan telah dilaksanakan dengan secara populasi terhadap seluruh Kantor Perwakilan BPK dan Kantor Pusat dengan Hasil Laporan Keuangan Tahun 2022 BPK memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dan ini capaian ke-16 sejak Laporan Keuangan BPK Tahun 2007.

Dan pemeriksaan laporan keuangan tersebut juga memberikan beberapa rekomendasi ya, meliputi: 1 rekomendasi SPI dan 3 rekomendasi terkait dengan kepatuhan, terutama kelengkapan atas pertanggungjawaban implementasi atau pelaksanaan APBN dalam perjalanan dinas. Oleh karena itu, seluruh rekomendasi dari kantor akuntan publik tersebut telah ditindaklanjuti oleh kami dan seluruh satuan kerja terkait.

Dengan demikian yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI, kami mohon dukungan atas persetujuan Pimpinan dan Anggota Komisi XI terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan untuk tahun 2022, sehingga mendapatkan keputusan dan menjadi arah perbaikan bagi kami di masa yang akan datang untuk melaksanakan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara di Badan Pemeriksa Keuangan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami kembalikan.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Singkat, padat dan efektif. Pak Misbakhun maunya begitu, singkat dan padat, *enggak* boleh bertele-tele.

Baik, silakan Plt. Kepala BPS, saya persilakan

Plt. KEPALA BPS (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Terima kasih atas kesempatannya Bapak.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,
Bapak Kepala LKPP,
Bapak Sekjen BPK,
Bapak Sestama BPKP,

Mohon izin Bapak Pimpinan, kami juga hadir bersama jajaran kami dalam rapat pada hari ini. Di sebelah kiri saya ada Pak Sestama, Pak Atqo Mardiyanto yang juga Bapak sudah ketahui dan juga hadir bersama kami, Irtama yang diwakili oleh Inspektur Wilayah II, ada Karo Keuangan, Karo Perencanaan, Direktur Pertahanan dan Sosial, juga Karo Humas dan Hukum.

Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI atas dukungan selama ini kepada BPS. Sebagai informasi Bapak-Ibu bahwa BPS saat ini sudah mencapai WTP selama bertahun-tahun, mulai dari 2017 sampai 2022 kami memperoleh opini laporan keuangan WTP. Kemudian juga untuk penilaian Sakip, skor kami memperoleh peningkatan dari tahun ke tahun, juga indeks reformasi birokrasi yang meningkat dari tahun ke tahun.

Anggaran BPS tahun 2022, awalnya kami memperoleh pagu alokasi sebesar Rp5,691 triliun, lalu kemudian memperoleh terkena *refocusing* dua tahap sebesar Rp599 miliar dan kemudian memperoleh relaksasi dari *automatic adjustment* sebesar 155,2 miliar *plus* juga kami memperoleh tambahan anggaran dari BA BUN sebesar Rp3,3 triliun untuk penambahan kegiatan Regsosek. Kemudian penambahan PNBPN dan juga ada hibah luar negeri sehingga pagu akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp8,560 triliun.

Kalau dilihat dari komposisi programnya, Bapak dan Ibu, kira-kira dari Rp8,56 triliun, 5,51 triliun itu berada di program penyediaan dan pelayanan informasi statistik dan sisanya ada di dalam program dukungan manajemen BPS. Untuk pagu dan realisasi anggaran 2022 dari tahun ke tahun *alhamdulillah* penyerapan anggaran BPS pun mengalami peningkatan. Jadi terakhir di tahun 2022, kami mencapai 97,08% ini juga yang tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Bapak.

Selanjutnya kalau kita lihat berdasarkan dua program kami penyerapan di tahun 2022 relatif berimbang, di mana penyerapan atau pun realisasi

anggaran untuk program dukungan manajemen sebesar 97,6% sementara itu juga realisasi anggaran untuk program PPIS sekitar 97% juga.

Berdasarkan pagu menurut sumber dana dan jenis belanja, untuk rupiah murni penyerapan kami atau realisasi kami sebesar 97,2% dan juga hibah langsung dari luar negeri realisasinya 97,2%. Penyerapan juga terlihat berimbang kalau kita apa namanya kita *breakdown* berdasarkan belanja pegawai, belanja barang, maupun belanja modal dengan besaran realisasi di kisaran 97%.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,

Untuk rincian anggaran penggunaan program PPIS BPS tahun 2022, pada intinya kami mendukung kegiatan prioritas nasional, baik prioritas nasional 1 untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, di sini kami menyediakan *passenger exit survey* penyusunan *tourism satellite account* pendataan wisata nusantara, pendataan statistik *e-commerce*, survei produktivitas tanaman pangan atau ubinan, serta pendataan tanaman pangan KSA dan juga persiapan sensus pertanian yang dilaksanakan sensusnya tahun 2023.

Untuk kegiatan yang mendukung prioritas nasional 2, kami melakukan Metropolitan Statistical Area atau MSA dan untuk mendukung prioritas nasional 3 kami melakukan sensus penduduk 2020 *long form* dan juga pendataan awal registrasi sosial ekonomi. Kegiatan statistik rutin BPS yang mendukung kegiatan prioritas nasional antara lain adalah survei sosial ekonomi nasional atau yang dikenal dengan nama Susenas, survei angkatan kerja nasional atau yang dikenal nama dengan Sakernas dan juga survei harga termasuk di dalamnya adalah pembaharuan dari survei biaya hidup.

Selanjutnya capaian dukungan BPS pada prioritas nasional RKP tahun 2022. Tadi yang sudah kami sampaikan antara lain kami sudah mempublikasikan wisatawan nusantara 2021 dan pendataan wisatawan nusantara 2022, termasuk penyusunan *tourism satellite account* dan juga penyiapan dari sensus pertanian 2023, yang sama halnya dengan prioritas nasional 2 dan 3, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya.

Terkait dengan perkembangan penyerapan anggaran BPS tahun 2023 dan juga tindak lanjut dari LHP BPK. Di tahun 2023, Bapak-Ibu, kami memperoleh pagu alokasi awal sebesar Rp8 triliun, dan kemudian memperoleh ataupun mendapatkan *automatic adjustment* sebesar Rp599,26 miliar dan yang 159 miliar rupiahnya langsung dihapus dari DIPA karena ini terkait dengan belanja pegawai, sehingga total pagu yang kami peroleh di tahun anggaran 2023 adalah Rp8,2 triliun, tetapi Bapak-Ibu kalau kita hilangkan anggaran *automatic adjustment* dari DIPA karena ini kami belum bisa memanfaatkannya sehingga total pagu yang kami miliki saat ini adalah Rp7,7 triliun.

Bapak-Ibu,

Selanjutnya adalah perkembangan tindak lanjut dari LHP BPK hingga semester 1 tahun 2023. Di mana terdapat 762 rekomendasi senilai rupiah 22,15 miliar dan 216,84 ribu US Dollar hingga semester 1 tahun 2023. Dari total 762 rekomendasi tersebut, sebanyak 618 rekomendasi sudah selesai termasuk yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Nilai penyerahan aset atau uang yang disetor ke kas negara itu senilai Rp14,31 miliar dan 12.000 US Dollar. Tidak ada rekomendasi yang belum kami tindaklanjuti.

Kalau kita lihat dari persebarannya yang sudah selesai kira-kira 78,61% dan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sekitar 2,5% dan juga belum sesuai ataupun belum selesai itu sekitar 18,9% saja. Untuk yang tidak dapat ditindaklanjuti antara lain Bapak-Ibu adalah misalnya kegiatan sudah berlalu yang tidak mungkin ditindaklanjuti, kemudian ada pegawai yang dikenakan sanksi tetapi pegawai tersebut telah pensiun atau sudah wafat dan pegawai yang dikenai telah menjalani hukuman putusan pengadilan dan lain-lain.

Sebagai penutup.

Bapak-Ibu, Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,

Di tengah situasi pandemi dengan *refocusing* anggaran tahun 2022 sebesar Rp599,26 miliar atau sebesar 10,53% dari total pagu awal, BPS tetap berkomitmen untuk menyediakan data statistik yang berkualitas yang dibutuhkan oleh pemerintah, terutama dalam mengambil keputusan dan data-data yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Komisi XI DPR RI dalam dukungan pelaksanaan sensus penduduk 2020 lanjutan di tahun 2022 yang sebelumnya tertunda tahun 2021 karena *refocusing* anggaran. BPS terus berkomitmen untuk menyelesaikan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK hingga semuanya nanti akan selesai ataupun telah sesuai. BPS terus mengharapkan dukungan dari Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI dalam rangka penguatan peran BPS ke depan, terutama untuk memberikan *insight* dalam rangka mendukung pemerintah untuk terus mengambil kebijakan berbasis data atau yang disebut dengan *evidence-based policy making*.

Demikian Bapak Pimpinan yang saya hormati. Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Singkat juga saya kira, terima kasih.

Pak Kepala LKPP, terakhir BPKP nanti lah ya.

KEPALA LKPP (HENDRAR PRIHADI):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam damai,
Salam sejahtera buat kita semuanya,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Pimpinan Sidang dan seluruh Anggota DPR RI Komisi XI yang selalu kami hormati dan kami banggakan,
Teman-teman mitra, ada Pak Sekjen BPK, Plt. Kepala BPS, Sekjen BPS dan Sestama BPKP,

Izinkan kami memperkenalkan teman-teman pada Deputi LKPP yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama, Deputi Pengembangan Strategi yang merangkap Plt. Sestama, Ibu Sarah mohon berdiri, di belakang *tuh* Pak Fathan ya. Kemudian ada PLt. Deputi Katalog Transformasi Teknologi, ada Pak Yulianto. Kemudian ada Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pak Sutan dan yang terakhir ada Deputi Bagian Hukum, Pak Setia didampingi para direktornya.

KETUA RAPAT:

Full team?

KEPALA LKPP (HENDRAR PRIHADI):

Full team iya.

Dalam kesempatan yang baik ini Pimpinan, izin kami menyampaikan apa yang sedang kami lakukan di dalam Laporan Keuangan LKPP, terutama di APBN Tahun 2022.

Pertama, pagu anggaran kami di tahun 2022 ini nilainya 169,2 miliar, kemudian terealisasi 163,7 miliar, distribusinya ada di belanja pegawai 49,9 miliar, belanja barang 95,1 dan belanja modal 18,7 miliar. Nah, pada kurun waktu mulai 2010 sampai 2022 oleh BPK kami sudah diperiksa dan di tahun 2013 dan 2016 opini kami adalah wajar dengan pengecualian, selebihnya adalah WTP, termasuk di tahun 2022.

Pemeriksaan Laporan Keuangan LKPP yang dilakukan oleh BPKP yang untuk menghasilkan opini laporan pasti sesuai standar pemeriksaan keuangan negara, kemudian bertujuan juga pemeriksaan ini atas laporan

keuangan negara. Ditemukan ada beberapa hal komponen laporan keuangan yang diperiksa, meliputi: neraca; laporan realisasi anggaran; laporan operasional; laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan. Ditemukan ada tiga temuan oleh BPKP dan telah kami tindaklanjuti ketiganya dan sesuai rekomendasi, dua sudah dalam proses, kemudian satu mohon maaf satu dalam proses dan dua sudah sesuai dengan rekomendasi. *Insyallah* pada minggu ini yang dalam proses itu sudah bisa kita selesaikan.

Kemudian hasil pemeriksaan BPK dari tiga temuan ini: pertama adalah pembayaran biaya transportasi udara pada perjalanan dinas biasa dan sudah kita tindaklanjuti; yang kedua pada penatausan aset tetap peralatan dan mesin, juga sudah kami tindaklanjuti; dan yang ketiga pada penganggaran belanja modal dan pelaksanaan paket pekerjaan yang hari ini sedang dalam sebuah proses untuk penyelesaian.

Nah, Bapak-Ibu sekalian,

Dari anggaran tersebut, *output* yang kami kemudian bisa sampaikan adalah, *next*. Untuk di tahun 2022 realisasi produk dalam negeri yang kemudian bisa diserap adalah 76%; kemudian untuk UMKK-nya dari Inpres 2 Tahun 2022 yang semestinya 40% minimal UMKK, tercapai 36,1% dan produk tayang di tahun 2022 mencapai 2,4 juta dari target 1,5 juta; kemudian nilai transaksi di *e-catalog* di tahun 2022 mencapai 83,9 triliun.

Untuk itu pada kesempatan yang baik ini kami mohon bimbingan, dukungan dari Teman-teman Komisi XI, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bisa menjadi awal perbaikan untuk LKPP ke depan.

Terima kasih.

Selamat sore,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Kepala LKPP.

Terakhir langsung dari Sestama BPKP, ini saya sampai ke Teman-teman, Kepala BPKP lagi di Istana, jadi kita izinkan Pak Sestama BPKP untuk menyampaikan paparan. Silakan.

SESTAMA BPKP (Dr. ERNADHI SUDARMANTO, Ak., M.M., M.Ak.):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Yang terhormat, Pimpinan Komisi XI DPR RI, serta Anggota Komisi XI,

Yang kami hormati, Pak Sekjen BPK, Bapak Kepala LKPP, dan Ibu Kepala BPS, Hadirin sekalian,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Izinkan kami Pak Pimpinan mewakili Kepala BPKP saat ini beliau sedang menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 bersama Pak Presiden. Hadir bersama kami saat ini adalah Deputi I BPKP, Deputi II BPKP.

KETUA RAPAT:

Dikasih tahu bidang apa ya.

SESTAMA BPKP (Dr. ERNADHI SUDARMANTO, Ak., M.M., M.Ak.):

Deputi I bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Pak Sallamat Simanulang. Yang kedua, Pak Iwan Taufiq Purwanto, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi III, Pak Raden Suhartono, membidangi Pengawasan atas Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan Ibu Deputi bidang Akuntan Negara, Ibu Sally Salamah. Hadir juga beberapa Direktur dan Bapak Kepala Biro, Pak Pimpinan dan Ibu Anggota Komisi XI,

Izinkan Bapak Pimpinan yang kami hormati, secara garis besar dan berurutan akan kami sampaikan terkait dengan hasil pengawasan BPKB tahun 2022. Kemudian manfaat dari penggunaan anggaran 2022, kemudian perbandingan atau tren anggaran. Kemudian juga apresiasi terkait kinerja keuangan BPKP, serta pada bagian akhir izinkan kami menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional serta laporan perubahan ekuitas BPKP tahun 2022.

Bapak-Ibu Pimpinan yang kami hormati,

Laporan Keuangan BPKP disusun berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, serta PP 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan juga aturan-aturan teknis lainnya.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang kami hormati,

Berikutnya kami sampaikan bahwa, *next slide*, pemanfaatan anggaran tahun 2022 adalah pertama, untuk kegiatan *assurance* sebanyak 14.413 kegiatan tentang penindakan kecurangan sebanyak 232 kegiatan dan *consulting* sebanyak 3.887 kegiatan.

Dari anggaran yang kami kelola, sebanyak 1,845 triliun berkontribusi terhadap keuangan negara sebesar 117 triliun dan menjangkau 86

lembaga, 552 pemerintah daerah juga desa, serta korporasi badan usaha milik negara dan daerah.

Pengawasan intern juga meliputi program prioritas terkait infrastruktur, kesehatan, Pendidikan, kesejahteraan social, penguatan ekonomi dalam negeri, fiskal serta tata kelola. Keseluruhan biaya tersebut menghasilkan kontribusi sebagaimana kami sebutkan tadi.

Pimpinan Rapat yang kami menghormati,

Berikutnya kami sampaikan bahwa dari data yang kami miliki menunjukkan bahwa dalam 3 tahun, 2020 hingga 2022 terdapat peningkatan atau tren peningkatan kontribusi terhadap keuangan negara. Hal ini menurut kami menunjukkan kesempatan menerapkan metode pengawasan intern dengan lebih baik dan juga karena kerja sama dengan *stakeholders* yang terkait. Kami juga mendapatkan banyak masukan, saran dan tidak sedikit dari Bapak dan Ibu di Komisi XI terkait substansi dan juga hal-hal yang bersifat strategis.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi XI,
Hadirin yang kami hormati,

Berikutnya kami sampaikan perbandingan anggaran BPKP dari 2019 hingga tahun ini. Tren anggaran menunjukkan peningkatan yang mencerminkan cakupan juga kedalaman serta prioritas pengawasan yang *Inshaallah* akan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan kami bertanggungjawab dengan sebaik-baiknya anggaran yang kami kelola tadi. Kami senantiasa mohon dukungan dan juga bimbingan dari Pimpinan serta Anggota Komisi XI DPR RI.

Bapak-Ibu, Hadirin yang kami hormati,

Berikutnya kami akan menyampaikan sedikit hal-hal yang menurut kami dapat menjadikan ataupun memicu kami di BPKP untuk selalu berikhtiar menjaga dan mempertahankan kinerja, diantaranya opini atas laporan keuangan BPKP, 15 kali berturut-turut mendapatkan opini WTP. Kemudian juga dalam bidang SDM mendapatkan BKN Award kategori "Implementasi Manajemen ASN Terbaik", juga "Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dengan kategori baik". Terkait dengan komunikasi BPKP mendapatkan predikat "Badan Publik Informatif" pada tahun lalu dan juga LPNK atas "Pengawasan Kearsipan Terbaik" tahun lalu. Berikutnya kami juga mendapatkan penghargaan dari ...(suara tidak jelas) terkait dengan "Kompetensi SDM".

Meski demikian Bapak-Ibu sekalian, kami akan tetap berupaya dan terus berbenah menyesuaikan dengan tantangan dan situasi dalam mengelola keuangan negara, menjalankan amanah tugas pengawasan intern dengan semakin baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Berikutnya kami sampaikan laporan keuangan. Yang pertama adalah terkait dengan LRA atau Laporan Realisasi Anggaran BPKP Tahun 2022. Kami bandingkan atau kami sandingkan dengan tahun 2021 nampak bahwa realisasi belanja tahun 2022 belum optimal, karena baru mencapai 93,11. Permasalahannya karena pada saat itu kami masih terkendala dengan belanja modal, pengadaan gedung dan juga alat, yang *alhamdulillah* pada saat ini sudah berjalan dengan baik, sehingga selesai pada tahun 2023.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Berikutnya adalah Neraca BPKP Tahun 2022 dan juga 2021, dari angka tersebut menunjukkan kenaikan senilai Enam Puluh Tiga Miliar koma Tujuh Ratus Dua Enam atau 1,19% yang terpengaruh oleh diantaranya penambahan asset, kemudian juga karena BPKP memperoleh penerimaan dari aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, juga kami mengadakan *software* untuk kemudahan atau percepatan bisnis proses dalam pengawasan intern, yang keseluruhannya berpengaruh pada nilai aset pada neraca.

Bapak Pimpinan Rapat Dengar Pendapat yang kami hormati,

Terkait kegiatan operasional, dapat kami sampaikan bahwa pada saat ini tahun 2022 kami defisit BPKP bertambah sebanyak 132 miliar, diantaranya karena biaya operasional bertambah 161 miliar, namun pada saat yang sama jumlah penerimaan negara di BPKP PNPB juga bertambah 29 miliar. Keseluruhannya menunjukkan angka yang kami sampaikan tadi.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Terakhir kami akan sampaikan Laporan Perubahan Ekuitas atau LPE BPKB Tahun 2022 dan 2021. Di mana di dalamnya ada peningkatan 62 miliar yang terjadi atau diakibatkan oleh koreksi yaitu pengurangan ekuitas, kemudian ada juga defisit LO, juga penambahan transaksi antarentitas, serta penambahan dan pengurangan dari pos-pos yang terkait, seperti pada paparan.

Bapak Pimpinan yang kami hormati,
Hadirin sekalian,

Demikian paparan dari BPKP dan kami mohon arahan, mohon dukungan, mohon saran perbaikan untuk selalu dapat efektif mendukung program pemerintah melalui kegiatan pengawasan intern.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT/F-PPP (Dr. H. M. AMIR USKARA, M.Kes.) :

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, Pimpinan dan Anggota Komisi XI. Seperti biasa setelah kita mendapatkan paparan, mendengarkan masukan atau bahan yang disampaikan oleh mitra, sekarang kita berikan kesempatan untuk teman-teman kalau masih ada yang mau menyampaikan pandangan/pendapat saya persilakan. Seperti biasa dari PDIP ada? *Eenggak* ada ya?

ANGGOTA KOMISI XI DPR RI:

Pak Hendrawan.

KETUA RAPAT:

Pak Prof ya? Silakan Pak Prof.

F-PDI PERJUANGAN (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Terima kasih.

Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota Komisi XI yang saya hormati, Mitra Komisi XI, ada Sekjen BPK, kemudian Lepala LKPP, Sestama BPKB; Plt. Kepala BPS dan segenap jajarannya yang terhormat,

Selamat sore dan salam kebangsaan untuk kita semua.

Yang pertama, secara umum saya menilai bahwa kegiatan belanja lembaga-lembaga sudah hampir menyamai tingkat sebelum Covid, bahkan saya bergurau mungkin lebih bagus dari sebelum Covid karena ketika Covid suasana begitu mencekam dan begitu pencekaman itu dilepas ada *spending euphoria*, hotel-hotel penuh ya, rapat-rapat tidak mengenal lelah begitu, itu sebabnya angka-angka capaiannya itu luar biasa, rekor tertinggi dari empat ini dipegang oleh BPK 99,6%, tepuk tangan dulu kita. Rekor terendah BPKP 93% kita tepuk tangan juga, ya ini tapi tentu pada dirinya sendiri apakah itu 99, apakah 93 ya, tidak mencerminkan kinerja secara menyeluruh karena harus dilihat lagi *spending quality*-nya ya, efektivitasnya dan seterusnya. Itu sebabnya izinkan saya menyoroti satu per satu. Saya mengapresiasi laporan yang disampaikan, tetapi untuk penajaman dan visi ke depan.

Ibu-Bapak dan Saudara-saudara,

Siklus pelaporan seperti ini, siklus untuk membandingkan rencana dengan realisasi ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk membangun peradaban bangsa. Laporan keuangan yang ditemukan oleh kita semua, jadi banyak orang menganggap remeh laporan keuangan, padahal laporan keuangan itu merupakan inovasi sosial yang terbesar dalam peradaban manusia. Coba kalau laporan-laporan seperti ini tidak ditemukan

dalam peradaban manusia, mungkin kita selalu meraba-raba apa yang harus dilakukan di masa depan berbasis apa yang sudah kita capai di masa lalu. Itu sebabnya apresiasi sekali lagi untuk siklus yang kita lalui ini karena banyak orang bilang “*Ah ngapain ini laporan formalitas saja*”, “*Ah ngapain ini rapat ini, ini kan hanya basa-basi institusional? Tidak seperti itu.*”

KETUA RAPAT:

Bertele-tele.

F-PDI PERJUANGAN (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Bertele-tele, padahal perlu pendalaman. Itu sebabnya dengan argumen seperti itu, saya ingin yang bilang tadi jangan bertele-tele ya ahli marathon kita Pak Misbakhun.

Yang pertama BPK. Pak Sekjen, ini semua lembaga sudah menyatakan 15 tahun berturut-turut WTP, meskipun sering diplesetkan wajar tanpa pemeriksaan. *So what next? What is next?* Kalau semua WTP semua, saya pernah menantang Pak Sekjen dalam suatu kesempatan, Pak Sekjen mungkin masih catat, saya menantang mari kita buat kategori baru yang kurang lebih *beyond expectation, beyond the call of duty* dan lembaga-lembaga seperti ini hampir pasti tidak pernah akan menjadi sasaran OTT KPK, karena apa, tidak hanya memenuhi hal-hal yang sifatnya prosedural, tetapi juga dijamin kualitas substansinya. Itu tantangan saya pernah saya sampaikan ke Pak Sekjen ke teman-teman BPK.

Terus yang kedua, bayangkan BPK menemukan ratusan ribu temuan, memberikan 106.000 rekomendasi, saya tantang bisa *enggak* diklasifikasi? *This is major finding, this is medium*, jadi ada kategorisasi, sehingga kita bisa menerapkan *management by exception*. Konsentrasi dan energi kita bisa difokuskan untuk titik-titik yang paling menentukan, sehingga kita tidak setiap tahun ratusan ribu rekomendasi, padahal hampir semuanya minor semua ya. Mari kita tangkap dagingnya ya, tangkap sumber-sumber pemborosan terbesar yang membuat bangsa ini tidak maju-maju ya, jangan-jangan Indonesia emas berubah menjadi Indonesia cemas, iya kan? Betul kan Pak Sekjen? Itu tantangan saya, itu sebabnya saya ingin betul-betul tantangan saya dijawab begitu.

Yang kedua BPS. Saya mengusulkan BPS nanti dalam rapat-rapat resmi Pak Pimpinan, sebenarnya jangan Menteri Keuangan dulu dong yang bicara, BPS dulu, semuanya berbasis data. Baru BPS datanya diolah sebagai perencanaan oleh Bappenas, apa yang bisa dilakukan oleh BI dan OJK dalam ekosistem perencanaan Pembangunan, baru yang terakhir ya semuanya dibungkus oleh kebijakan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan. Sekarang jadi terbalik, tadi Ibu, *aduh* padahal Ibu yang dipaparkan bagus sekali tadi, kemiskinan kita seperti ini, tingkat kemiskinan kita diukur dengan standar *low income country* bukan *middle income country* ya dan seterusnya. Jadi usulan ini nanti akan dibicarakan internal Ibu, jadi bukan tapi Ibu luar biasa. Ibu mengadakan Regsosek tetapi koordinasi data Regsosek

dengan data DTKS saja belum terjadi, sehingga yang satu Ibu sibuk mengumpulkan data, yang satu menggunakan kegiatan Perlinsos ini berdasarkan data yang sama.

Nah, ini bagaimana kita sudah mengeluarkan hampir 4 triliun, tapi kalau datanya nanti tidak digunakan untuk instrumentasi kebijakan, saya risau Bu ya, itu sebabnya Ibu mohon lobi-lobi lintas karena ini ada Perpres 1, PP Satu Data Indonesia, Perpres ya, ini harus mulai dan DPR sudah memikirkan legislasi politik, legislasi kita untuk mengusulkan RUU Integrasi Data Pembangunan, meskipun belum prioritas untuk masa sidang atau tahun ini ya, tetapi kita sudah harus mulai merintis jalan ke arah sana. Jadi data, tanpa data ya kita tidak bisa menilai apakah kebijakan kita efektif atau tidak.

BPKP, BPK perjuangan, ini BPKP BPK perjuangan. Terima kasih ya, perjuangan artinya Bapak, Pak Sestama tahu ya apa arti perjuangan. Perjuangan menurut sastrawan WS Rendra adalah pelaksanaan kata-kata ya. Jadi itu sebabnya orang yang berjuang itu sebenarnya orang yang sedang menunaikan janjinya ya, membayar janji-janjinya.

Nah Pak BPKP, selamat karena dalam perjalanan satu tahun terakhir ini ya BPKP menimbulkan apa diskursus nasional, ya temuan-temuannya menggelegar ya, ini luar biasa Pak ya, mudah-mudahan iya kepercayaan luar biasa meningkat, kalau di Bursa Efek itu harga sahamnya naik ya. Jadi itu sebabnya saya mengharap BPKP terus ya melakukan terobosan-terobosan penting begitu ya karena kita tidak bisa saling menunggu ya. Banyak sekali selalu menjadi keluhan kita semua bahwa kalau anggaran-anggaran pembangunan kita bisa efektif dijalankan ya, kita mempunyai amunisi dan modal yang lebih besar untuk kemajuan bangsa.

Mas Hendy ini sahabat saya dan terima kasih LKPP. Ketika Gus Dur menjadi presiden, saat itu yang memilih MPR. Gus Dur bertanya kepada sejumlah orang, "Mari kita naikkan gaji pegawai negeri ya 600%". Jadi naiknya 6 kali lipat, supaya apa, supaya ASN bisa hidup dengan aman dan nyaman, tidak lagi seperti yang sekarang ya gajinya katanya hanya untuk dua minggu, bahkan tidak sampai dua minggu sudah habis. Mari kita jadikan ASN ya sebagai satu lembaga yang menjadi percontohan bagi semua orang ya. ASN harus menjadi institusi teladan ya, itu sebabnya naik 600%.

Bagaimana caranya Menko Perekonomian saat itu Kwik Kian Gie mengatakan "Kita serahkan ke LKPP, kita bentuk LKPP, kita serahkan, padahal jumlah pembelian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah kalau dilakukan konsolidasi, efisiensi, harmonisasi akan memberikan dana yang cukup untuk membayar kenaikan gaji itu. Itu sebabnya harapan kita terhadap LKPP luar biasa ya. Itu sebabnya Ibu-Bapak dan Rekan-rekan di Komisi XI ya ini *under represented* ya, *under utilize institution* ya. Jujur saja itu maaf mengatakan "Oh iya ya kita *enggak* kepikiran", ya karena apa, karena kalau skala pembelian ya, skala negosiasi dan sebetulnya disatukan, itu kekuatannya luar biasa ya, tidak belinya *icrit-icrit* ya. Dia bilang "Kerjakan!".

Sayang saat itu situasi politik tidak memungkinkan untuk melakukan ya langkah-langkah yang *mature* ...(suara tidak jelas).

Nah, itu sebabnya teman-teman semua ini LKPP, ini Pak Hendy luar biasa ini sangat enerjik, mudah-mudahan bisa melakukan apa langkah-langkah koordinatif, konsolidatif, karena saya dengar laporan dari Ketua LKPP sebelumnya, Kepala LKPP sebelumnya hanya dari pembelian, maaf koreksi kalau saya keliru, hanya dari pembelian laptop saja sudah dilakukan penghematan kalau tidak salah maaf sekian puluh triliun, 1,8 triliun, bayangkan! *Only single item you can generate saving 1,8 trillion*. Itu baru satu Pak. Itu sebabnya dulu waktu Gus Dur luar biasa ya. Saya sangat hormat dengan Kyai Haji Abdurrahman Wahid itu ya. *Vision* ke depan ya ini sudah luar biasa.

Jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Bapak dan Ibu luar biasa ini teman-teman kita, *good is not enough when better is possible*, baik tidak cukup kalau lebih baik masih dimungkinkan.

Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf.

*Wallahul muafik illa aqwamith tharieq
Nasrun minallah wa fathun qarib,
Wabillaahittaufik walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Merdeka!*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ampun, sudah kalah PKB, ini mana PKB?

Terima kasih Prof.

Saya lanjut saja Golkar? *enggak* ada yang berani?

ANGGOTA KOMISI XI DPR RI:

Pak Misbakhun.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Misbakhun.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Enggak, jangan juga lama-lama ya silakan, silakan Pak Misbakhun.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Terima kasih Pak Ketua.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang saya hormati,
Sekjen BPK, Plt. Kepala BPS, Kepala LKPP, Sestama BPKP beserta para
Deputi serta jajaran yang saya hormati,**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.*

Kalau Profesor sudah bicara kan kita sudah habis ini materinya. PDI Perjuangan ini sudah anggotanya sangat berkualitas, kebebasan diberikan penuh Pak itu, benar-benar partai demokrasi Pak. Jadi bisa berbicara dengan begitu jelas, panjang, tidak bertele-tele.

Terima kasih. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama ini kan membahas mengenai laporan Pak ya. Laporan ini sebenarnya dari saya yakin dari keempat lembaga ini adalah lembaga yang sebenarnya memang tugasnya mengawal, mengawal republik ini supaya dalam tata kelola yang bagus, dalam tata pelaksanaan anggaran yang bagus. Jadi kalau dalam setiap tahun ceritanya BPKP, terus BPK, LKPP dan sebagainya, itu wajar tanpa, WTP semua ya itu kan sebenarnya bukan sesuatu prestasi Pak, tapi tradisi ya kan tradisi, termasuk BPS, apalagi harapan kita semua di Komisi XI ini Bapak-bapak justru harus menjadi contoh, harus menjadi contoh mengenai bagaimana sistem itu dibangun karena Bapak-bapak adalah tugasnya membangun sistem pengawasan dan pemeriksaan di republik ini.

LKPP ini kan diharapkan membangun transparansi yang selama ini menjadi titik paling lemah kita dalam pengadaan barang dan jasa, dalam pengadaan barang dan jasa, tapi luar biasa tadi yang disampaikan oleh Profesor, seharusnya BPS itu yang paling awal berbicara, tetapi BPS ini sebenarnya yang menjadi bukti bagi republik ini bahwa kinerja itu didasarkan pada data, bukan didasarkan pada narasi kata-kata begitu.

Kalau data berbicara, narasi apapun yang disampaikan itu tidak akan berbunyi kalau datanya mengatakan berbeda, karena di republik ini ada dua cara kita untuk membangun citra, berdasarkan narasi atau berdasarkan data, nah tinggal masyarakat yang menilai. Nah, contohnya LKPP, LKPP ini adalah titik awal kita membangun transparansi, karena apa, dari LKPP inilah orang berbicara oh harganya segini, prosesnya seperti apa, semuanya transparan terbuka, tapi coba kita bandingkan sekarang apakah kita serius mengurus transparansi, keterbukaan, akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa yang merupakan titik paling sentral yang selama ini kata kalau bahasanya Profesor itu tempat *hengky-penky* ya Prof ya?

Negara ini kan mau kita buka, terbuka pengadaan barang dan jasa yang selama ini titik paling rawan begitu, tapi apa Pak coba anggarannya Pak Hendy ini, 1 triliun *enggak* sampai Pak itu. Dulu kita paling sedih Pak, 150 sudah dipotong juga, 120 dipotong juga.

Tadi kalau kita bicara soal *automatic adjustment* dengan segala istilahnya dan narasi yang berkelanjutan tentang *automatic adjustment* lah, terus *self* apalah itu, dan itu kan sebenarnya ujungnya cuma satu pemotongan begitu, dipotong oleh orang yang tidak pernah memotong anggarannya begitu. Lah ini yang terjadi. Kalau memang kita mau serius membangun transparansi dan keterbukaan dalam proses, harusnya bagaimana LKPP ini disediakan anggaran yang cukup memadai membangun basis *server* yang kuat, sistem IT yang paling canggih di republik ini, tidak bisa diterobos, bisa ditransaksi *anu-anu*, harusnya LKPP ini kan, bagaimana kemudian LKPP menjadi sangat kuat membangun sistem itu, tapi apa yang terjadi LKPP 200 miliar saja baru sekali ini, sudah sampai 200 belum Pak Hendy? Ya, baru 2023 karena Pak Hendy sudah dibantu oleh teman-teman itu. Kalau bukan Pak Hendy *enggak* bakalan bisa itu Pak, betul Pak itu. Kalau bukan Pak Anas, Pak Hendy, *enggak* bakalan itu. Percaya sama saya itu, karena takut ditanduk saja Pak makannya di karena takut ditanduk saja Pak, kalau *enggak* kita ini sudah berjuang untuk LKPP berapa kali. Sama dengan BPKP dan BPK ini. Dalam pengadaan barang dan jasanya harus kuat, diawasi proses pembangunannya harus oleh BPKP dan pemeriksaannya oleh BPK itu.

Kita yakin Pak tidak ada proses orang yang suka diawasi Pak, tetapi dalam rangka membangun tata kelola negara yang baik, pengawasan itu kan harus melekat dan itu ada di dalam BPKP. Menambah anggaran BPKP bagi kita itu setengah mati, sama dengan BPK, karena apa, tidak gampang orang itu mau menerima hasil pemeriksaan BPK. Sama tadi kalau kita lihat hasil pemeriksaan BPK terhadap BPS, ada yang sudah meninggal tidak bisa ditindaklanjuti dan sebagainya. Ini yang terjadi, tapi saya yakin dengan lembaga-lembaga ini bahwa apa yang disampaikan di dalam laporan ini mempunyai kualitas yang memadai karena Bapak-bapak adalah contoh dari Lembaga negara yang diharapkan memberi keteladanan kepada lembaga negara yang lain untuk mempraktikkan tata kelola yang benar, akuntabilitas yang memadai, keterbukaan yang bisa dibaca secara benar oleh rakyat, sehingga menjadi salah satu *benchmarking* yang kuat membangun tata kelola yang namanya integritas, *governance*.

Kemudian yang lain-lain itu mengikuti dan menurut saya apa yang menjadi pencapaian ini, standarnya kan harus selalu naik Pak, harus selalu naik, tidak boleh kemudian kalau WTP-nya di sini terus tahun depannya begitu, tapi saya sebenarnya sangat berharap ke Pak Hendy ini Pak, Bapak harus menguatkan bagaimana membangun sistem servernya, sistem server yang dan itu kalau kita memang mau serius di sana, itu bukan urusan duit setriliun, dua triliun Pak, melebihi dari itu semua Pak. Apakah itu diadakan oleh Bapak, diadakan oleh siapa, tapi kalau kita memang mau serius di situ dan LKPP bisa membangun sistem sistem Pak ya, di mana belanjanya seluruh kementerian lembaga itu harus ke tempat Bapak. Bapak bisa menjadi

lebih dari Tokopedia, di mana mengintegrasikan kartu kredit pemerintah di sana, sistem *payment* yang harus dibangun dan sebagainya yang kalau menurut saya cita-cita besar transparansi dan akuntabilitas itu akan ada di sana Pak.

Saya berharap Bapak sebagai tokoh muda yang bisa memberikan apa ya gagasan besar kepada republik ini bisa dicapai dengan yang apa yang Bapak pegang sekarang. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Ketua sebagai tambahan dari Prof. Hendrawan cuma nambahin saja. Mudah-mudahan tidak bertele-tele.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Saya *enggak* mau komentari. Terima kasih Pak Misbakhun.

Dari Gerindra?

ANGGOTA KOMISI XI DPR RI:

Tadi Kapoksi-nya *enggak* ada.

KETUA RAPAT:

Oh ya sekarang Kapoksi, silahkan Pak Gus Irawan.

F-P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak., M.M.CA.):

Terima kasih Pimpinan, Pak Amir.

Pimpinan dan Bapak-Ibu, Sahabat Anggota Komisi XI, para mitra kerja kami Pak Sekjen BPK, Kepala LKPP, Pak Sestama BPKP dan Ibu Plt. Kepala BPS dan seluruh jajaran,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Saya kira kalau sudah ini dia sulitnya bicara setelah Professor, sudah sangat detail, dipertajam pula lagi oleh Pak Misbakhun, panjang, tajam, tapi *tak* bertele-tele. Ini kok jadi anu *nih* soal bertele-tele. Saya mau bertele-tele sekarang, karena saya punya hak untuk bertele-tele. *Enggak*, bagaimana *tak* bertele-tele mitranya ada empat, *enggak* bukan bertele-tele, tapi mungkin menjadi agak lebih lebih sedikit panjang karena kan *enggak* adil nanti kalau cuma kita ke Sekjen BPK begitu, nanti dikirain ada apa-apa lagi dengan yang

lain ya kan, tapi Pak memang secara umum ya mitra kerja kita ini saya sependapat *tuh* Pak Misbahkun ini mesti jadi *role model* bagi lembaga lain Pak.

Nah, karena itu ya terima kasih apresiasi, saya kira kinerjanya dari sisi keuangan anggaran ya saya kira semuanya keempatnya bagus begitu ya, IKU-nya juga kelihatan bagus, tapi pertanyaan berikut Pak tentu ini kita harapkan untuk terus dipertahankan, tadi bahkan oleh Prof bilang ya kalau masih bisa lebih bagus tentu kita mau capai yang lebih bagus.

Tapi pertanyaan berikutnya Pak dari ukuran ini, lebih jauh ini harapan Pak, bagaimana yang bagus ini tetap terus kemudian bertahan dan ditingkatkan, tapi di ujungnya saya lebih kemudian kemanfaatannya gitu ya Pak, ya tentu sesuai dengan Tupoksi masing-masing bisa menjadi lebih maksimal katakan lah ya kan. BPK misalnya saya *enggak* tahu tadi berapa ratusan ribu temuan gitu ya. Saya kira apa namanya ya bagaimana temuan itu juga sekian banyak itu rasanya bisa lebih kemudian disederhanakan, karena bagaimanapun setiap temuan itu wajib oleh auditee untuk tindaklanjuti. Kadang-kadang kemudian begitu Pak ya, menindaklanjuti itu banyak alokasi waktu tenaga untuk hanya sekadar menindaklanjuti temuan yang kadang-kadang begitu mungkin tidak terlalu krusial, misalnya begitu Pak. Nah, karena itu kemudian tadi ya yang baik-baik ini tentu pertahankan, tingkatkan, tetapi kemudian ke depan harapannya adalah dari sisi kemanfaatan ya.

BPKB misalnya ini saya khawatir saja Pak kalau kemudian nanti ukurannya anggaran BPKP 1,8 triliun misalnya Pak diperbandingkan dengan hasil yang kemudian oleh BPKP bisa dapatkan dari berbagai kegiatan efisiensi, penyerapan keuangan negara dan optimalisasi jumlahnya 117.000. Ini seolah-olah kita sandingkan kami *cost*-nya hanya pakai 1,8 triliun, tapi kami bisa menghasilkan 117 triliun.

Saya khawatir ini menjadi sebuah target, ini yang tadi kemanfaatan dari ini sesungguhnya kalau BPKP, saya tadi berharapnya BPKP itu duduknya dekat begitu sama BPK begitu ya, karena yang iya iya Pak. Saya *enggak* tahu *nih* kenapa Pak Kepala LKPP diantaranya oleh, karena ini kan boleh dibilang internal auditornya ada di BPKP begitu ya, eksternal auditornya di BPK. Nah, kalau sistem, saya kira yang menjadi penting harusnya dihasilkan oleh BPKP sudah bagus begitu Pak, kan nanti hasil-hasil ini kalau semua sudah bagus, hasil ini menjadi nihil, saya kok rasanya ukurannya berbanding terbalik Pak. Kalau masih Bapak menghasilkan lebih banyak, berarti sistemnya belum bagus, baik Pak begitu. Saya, bukan begitu Pak begitu? Tapi di mana temuan Bapak itu menghasilkan ada tiga poin ini, berarti ada sesuatu di situ yang kemudian belum baik. Saya mohon maaf ini melihatnya seperti itu begitu. Saya kebetulan akuntan juga, pernah belajar *anu*, ya Pak ya, iya kan kan bukan tujuannya mendapatkan temuan, apalagi internal begitu, sehingga nanti kalau sistem itu internal, sistem internal kontrol yang dibikin sudah bagus Pak, kerja teman-teman dari auditor eksternal BPK itu menjadi lebih ringan juga sesungguhnya, *enggak* lagi ada mungkin ribuan temuan yang kemudian didapatkan begitu.

Nah, tentu demikian LKPP yang tadi saya kira juga teman-teman punya harapan besar sesungguhnya, saya kejutan juga dari satu *item* saja ternyata bisa kita lakukan efisiensi 1 triliun kan luar biasa Prof ya kan, tapi anggarannya secuil banget begitu Pak. Sama BPS juga saya kira pada akhirnya bagaimana data analisis data yang dihasilkan itu dari sisi kemanfaatannya gitu, oleh Ibu kan menghasilkan data, *user*-nya banyak begitu ya, ya bisa ya kita pemerintah, bisa saya kira perbankan, bisa lembaga-lembaga lain. Nah, bagaimana kemudian itu lebih memberikan manfaat yang lebih luas lah begitu dengan kualitas data analisis data yang terbaik. Di empat lembaga ini menurut saya memang butuh satu penguatan sistem, sistem IT yang lebih solid.

Saya pendapat Pak Misbakhun Pak, bagaimana sekarang ya coba kemudian orang sudah bicara apa namanya digital forensik misalnya iya kan. Orang sudah bicara AI, itu semua butuh satu apa.

Selamat datang Kepala BPKP yang sesungguhnya.

KETUA RAPAT:

Selamat datang Pak Yusuf, Kepala BPKP.

F-P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak., M.M.CA.):

Karena beliau sudah datang Pak, saya *enggak* mau lagi bertele-tele, tapi di intinya di keempat mitra kita ini Pak menurut saya optimalisasi dari fungsi tupoksi-nya keempat mitra kita ini akan membutuhkan menurut saya satu teknologi informasi yang kuat, makanya ya kan, *e-audit* itu menjadi sangat mudah Pak kalau kemudian itu dilakukan tersistem digital forensik AI kan, *Artificial Intelligence*. Saya kira apa ya coba Pak nanti mungkin bisa kita diskusikan per masing-masing lembaga ini untuk tadi memperkuat Tupoksi di keempat mitra kami ini ya.

Saya kira itu Pimpinan. Terima kasih apresiasi untuk keempat mitra kita ini dan saya kok berharap nanti kita akan diskusi lebih jauh bagaimana optimalisasi dari pelaksanaan Tupoksi di keempat mitra dan soal data sedikit ya, kalau boleh ini kan kita bicara sesungguhnya adalah laporan keuangan 2022, lalu diperbandingkan dengan 2021 begitu ya. Saya tadinya berharap ada *outlook* 2023 begitu Pak supaya agak lebih lengkap, nanti kan sebentar walaupun kita pagu indikatif sudah bahas yang lalu, sebentar ini kan kita akan bicara untuk pagu definitif untuk APBN 2024. Dengan ada *outlook* itu mungkin lebih mudah bagi kami kalau ada di sana-sini penambahan atau pengurangan. Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Gus Irawan. Saya kira kalau untuk *outlook* 2023 kita pasti ketemu di rencana APBN untuk 2024. Terima kasih.

Lanjut dari Nasdem? Lagi konsolidasi ya? Ada, ada, Pak Nasdem langsung, ini langsung diwakili oleh Pimpinan ini Nasdem ini. Silakan Pak kakak ipar.

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI/F-P.NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI S.E., M.Si.):

Terima kasih Ipar.

Pak Kepala BPKP,

Saya tadi punya mata dari ujung ke ujung.

KETUA RAPAT:

Enggak ada orangnya?

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI/F-P.NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI S.E., M.Si.):

Kemudian saya nanya ke mana ini, muncul. Saya, Pimpinan Sidang mau apresiasi ke tiga lembaga ini ya, BPK, BPKP, LKPP.

ANGGOTA KOMISI XI DPR RI:

BPS?

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI/F-P.NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI S.E., M.Si.):

BPS ya.

Pak Sekjen BPK,

Lima belas kali WTP berturut-turut, spektakuler Bapak, Kementerian Keuangan saja dua belas kali saja, di BPK dan BPKP luar biasa. Capaian kinerja Pak Sekjen, saya melihat di sini rekomendasi sejumlah sekian belum ditindaklanjuti 4,7%-nya Pak ya atau setara dengan 31 949 atau nilai uangnya 18,29 triliun, begitu Pak Sekjen? Tapi di bawah ini tidak dapat ditindaklanjuti 1,1% atau setara uangnya 23,8 triliun. Ini kenapa tidak ditindaklanjuti Pak? Kenapa tidak bisa ditindaklanjuti ya? Ya nanti Pak Sekjen sebentar baru jawab sekalian.

BPKP ...(suara tidak jelas). Statistik dulu. BPS ini alokasi plafonnya spektakuler, tinggi termasuk dan paling tinggi selama BPS dibentuk, barangkali terbesar 2022 ini atau 8,1 triliun belum pernah kita sudah 10 tahun di sini dan ini paling terbesar, berkah ini kali ya. Kemudian Ibu ada 4 poin yang tidak dapat ditindaklanjuti secara sah. Saya melihat satu di sini karena yang bersangkutan pensiun atau wafat. Kalau setahu saya kerugian negara walaupun dia wafat dikenakan kepada ahli warisnya harus menyelesaikan itu, tapi di statistik ini dibebaskan, ini hebat ini, ini nanti dijelaskan Ibu.

Kemudian nanti Bu menjelaskan ini saya juga baru membaca ini, pagu dengan menghilangkan anggaran AA dari DIPA, kode AA ini apa? Ya supaya kita juga paham ya Bu ini apa kode...

KETUA RAPAT:

BPS.

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI/F-P.NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI S.E., M.Si.):

(suara tidak jelas)

ANGGOTA KOMISI XI:

Izin Bapak, BPS.

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI/F-P.NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI S.E., M.Si.):

BPS oh ini sudah tadi.

BPKP, sudah, sudah BPKP. BPKP juga lima belas kali WTP berturut-turut ya luar biasa. Nah, saya hanya menanyakan satu Pak, aset lainnya adalah 18,5 ya. Nah, aset lain ini kalau kita susun neraca, ini kebetulan Bapak susun neraca ini, saya mau tanya aset lain itu termasuk apa saja? Kan Bapak paparkan di sini aset lainnya, sehingga saya mau tanya seperti apa aset lain? Karena kita kenal di dalam neraca aktiva lancar, aktiva tetap, kalau aktiva lainnya ini dalam bentuk seperti apa kalau kita punya pengalaman coba ya.

LKPP, ada satu temuan yang masih dalam proses Pak ya? Iya itu, satu temuan yang masih dalam proses penerbitan memorandum teguran atas hasil rekomendasi dari BPK pada pada Laporan Keuangan Tahun 2022, ini saya piker baik ini.

Kemudian dari BPS, statistik. Ibu, kita ketemu tadi pagi, sekarang ketemu lagi. Ya Ibu juga mencantumkan ini tadi telah menjalani hukuman putusan pengadilan. Kalau menjalani putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap, berarti kerugian negaranya dibebaskan begitu Bu? Ya kalau kita terjemahkan bahasa ini kan dimaknai seperti itu, kalau dia kena hukuman berkekuatan hukum tetap, dia dibebaskan ya? Itu saja Ibu, yang lain

saya apresiasi karena alokasi plafonnya meloncat tinggi sekali dari sekian triliun naik ke 8 triliun, luar biasa.

Terima kasih Pimpinan Rapat.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak.

Ini sudah pimpinan juga ini, jadi atas nama Pimpinan dan Fraksi Nasdem. Terima kasih Pak Hatari.

Lanjut dari PKB.

Demokrat ya, Demokrat dulu Bu Siti dulu, silakan.

F-PD (Dr. Hj. SITI MUFATTAHAH, Psi., M.B.A.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Langsung saja, saya hanya memberikan beberapa evaluasi atau pendalaman terhadap BPKP, kemudian BPK, LKPP dan BPS. Namun, yang paling menjadi konsen kami untuk kali ini adalah BPKP, karena dari apa yang disampaikan dipaparkan kali ini, ada beberapa hal yang menggelitik kami untuk mendalami dalam rapat ini.

Nah, saya lihat dalam paparan ini, hasil pengawasan BPKP membuahkan total kontribusi keuangan negara sebesar 117,83 triliun, serta penyelamatan keuangan negara atau daerah sebesar 37 triliun. Ini data yang kami dapatkan di sini dalam paparan ini. Nah, bagaimana hasil ini bila dibandingkan dengan tahun yang lalu? Kita bandingkan antara tahun 2022 dengan 2023, itu yang pertama.

Kemudian yang berikutnya juga kami ingin mengetahui secara lebih mendalam lagi mengenai pengelolaan fiskal. BPKP telah mengawal akselerasi ya belanja sebesar 542 Pemda di seluruh Indonesia. Namun, yang kami temui dalam lapangan adalah banyaknya berita mengenai realisasi belanja daerah yang rendah, juga realisasi pendapatan daerah yang baru mencapai 90,60% pada akhir tahun 2022. Artinya cukup jauh dari targetnya. Sebenarnya bagaimana upaya konkret BPKP dalam pengawalan akselerasi belanja ini? Seperti apa bentuknya kira-kira?

Kemudian yang berikutnya, juga dengan laporan keuangan yang telah disampaikan oleh BPKP, apa kira-kira kelemahan dan evaluasi yang BPKP harapkan ke depannya sehingga kita bisa melakukan atau mendapatkan hal-hal yang lebih baik daripada tahun yang sekarang ini ya tahun 2022, 2023?

Nah untuk yang berikutnya, saya ingin juga mengetahui LHP kinerja tahun 2022 sepertinya turun signifikan dibandingkan tahun 2021, padahal audit atau pemeriksaan kinerja sangat penting dalam memastikan pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dijalankan secara ekonomis, efisiensi, efektif, serta ketaatan pada peraturan, apalagi terkait dengan *spending better* APBN, sehingga kami kira BPK khusus BPK kali ini perlu meningkatkan audit kinerja tersebut ya.

Kemudian hasil pemantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum sesuai rekomendasi masih sangat tinggi sebesar 113 208 rekomendasi, sekitar kalau dipersentasi sekitar 16,9% ya Pak ya, senilai 116,44 triliun. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan dan bagaimana strategi BPK yang untuk menyelesaikan hal ini begitu? Saya fokus kepada BPKP dan BPK untuk kali ini.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Terima kasih Bu Siti.

Pak Ustad, silakan.

F-PKS (H. HIDAYATULLAH, S.E.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalaamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Komisi XI dan Anggota Komisi XI,
Bapak-Ibu Mitra Komisi XI yang hadir, Sekjen BPK, Kepala LKPP, kemudian Pak Ketua BPKP dan Ibu Plt. Kepala BPS, beserta seluruh jajaran,

Terima kasih atas presentasinya, menambah data-data yang ada pada kami.

Saya mulai dari BPKP. Tadi sudah disampaikan Pak Gus tentang ukuran manfaat penggunaan anggaran BPKP dengan hasilnya Pak, walaupun tergantung dari sisi pandang mana kita melihatnya. Kalau dari perbandingan 2020, 2021, 2022, kesannya makin *enggak* bagus pengelolaan negara kita ini Pak karena temuannya makin besar 61 triliun, turun 54 triliun, eh sekarang naik lagi jadi 117 triliun kalau dari sisi menilai yang diperiksa, tapi dari BPKP-nya yang menarik itu adalah terkait dengan optimalisasi penerimaan negara. Nah, ini perlu penjelasan nanti Pak. Ini kan penerimaan

negara ini selama ini yang kita fokus itu adalah yang sudah masuk ke dalam kas negara, lalu apakah ada penyimpangan atau tidak dalam pemanfaatannya, tapi jauh yang lebih besar menurut kami kalau melihat potensi yang ada dengan apa yang diterima itu adalah yang belum masuk itu, potensi yang tidak masuk.

Nah, kalau ini bisa dikejar, saya kira hasil yang ini 4,5 triliun Pak ya, susah kali *sih* Bapak kemarin untuk minta anggaran itu gitu ya, padahal dari sisi yang 4,5 triliun saja Bapak layak untuk mendapatkan tambahan anggaran, kerjanya bisa lebih efektif lagi untuk mendapatkan manfaat dari kerja-kerja BPKP.

Kemudian yang kedua yang 117 triliun itu, ini pemahaman kita di sini kalau ini bisa diselamatkan, berarti ini kan ada di kas negara Pak. Nah, kemarin kita kalau cerita pemanfaatannya seperti apa ini? Hasilnya ini persisnya di apakah disetorkan Kembali ke negara? Karena ini kaitannya dengan konfirmasi ke bendahara negara terkait dengan SiLPA kita, ini kan uangnya akhirnya tidak digunakan dan kalau penggunaannya tentu atas persetujuan dari DPR. Nanti perlu penjelasan itu Pak, ke mana uangnya yang 117 triliun ini? Karena ini besar ini uangnya ratusan triliun, SiLPA kita pun sekitar 400-500 triliun kalau 2022.

Kemudian ke BPK. Saya kira fokusnya itu juga Pak. ini terkait masalah penghasilan kita yang potensi yang belum semuanya bisa wujud jadi pendapatan, termasuk masalah pajak kita, wajib pajak kita antara yang ada dengan yang sudah bisa, target kita yang mau dua digit itu sangat sulit untuk dicapai. Dari BPK bisa membantu untuk bagaimana mendorong ini semua dan yang kedua sekarang ini sedang ribut-ribut Pak itu tentang eksploitasi sumber daya kita, masing-masing mengatakan ini kerugian negaranya segini, apa segala macam, kalau bisa dibantu diaudit Pak. Jadi ketahuan sebenarnya masalah hilirisasi segala macam itu kita bisa tahu sebenarnya berapa yang didapatkan yang harusnya didapatkan negara, berapa kerugian negara, tidak hanya menggantung dalam perdebatan di menjadi wacana publik. Kita *enggak* tahu yang sebenarnya seperti apa.

Kemudian ke Bu Kepala BPS Bu ya. Kita perlu data yang kuat tadi sebagaimana disampaikan Prof. Kita sudah melakukan banyak hal dalam waktu yang panjang mengeluarkan dana yang luar biasa besar sektor Pendidikan, terus sekarang seperti apa kondisi pendidikan kita? Apakah masih 20% terus kita kasih siapkan atau perlu diperbesar atau justru perlu dikurangi untuk sektor yang lain? Nah, seperti apa pembangunan kita setelah 30 tahun sektor pendidikan, sektor kesehatan sehingga dengan data yang kuat dari kondisi bidang itu, kita punya kemampuan untuk memberikan masukan ke dalam penyusunan APBN terutama untuk distribusi kepada kementerian dan lembaga, karena sekarang masing-masing kan ini rebutan soal anggaran.

Ini datanya *enggak* jelas, termasuk misalnya untuk kalau ketika kita menghadapi persoalan kemiskinan seperti yang Ibu sampaikan itu, bagaimana kita mengalokasikan dananya sehingga bisa sampai kepada

orang-orang miskin itu karena kita punya banyak data, sehingga kegiatan kita untuk yang kegiatan sosial itu 400-an triliun lebih itu, bagaimana memastikannya untuk semua tepat sasaran kepada orang yang berhak menerimanya, karena kalau di lapangan biasa *sih* Bu kalau kita turun ya yang menerima bantuan-bantuan itu kita *enggak* tahu persentasinya, Ibu bisa nanti mengecek, sebagian *enggak* tepat sasaran dan itu ya sudah jadi rahasia umum saja karena yang menerima itu nanti adalah tim suksesnya kepala desa misalkan, sementara tim sukses kepala desa itu kan tidak semuanya berhak menerima bantuan itu, tapi jalan apalagi kepala desa mau membalas budi kepada timnya, tim pemenangannya, akhirnya terjadi seperti itu. Pemerintah sudah mengeluarkan banyak dana untuk itu, tapi di bawah itu masih belum terselesaikan bantuan-bantuan seperti itu. Jadi kita perlu data, data yang kuat. Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dari PAN *enggak* ada ya?

Ulang tahun, masih ulang tahun terus ya?

ANGGOTA KOMISI XI DPR RI:

Ulang tahun fraksi kali.

KETUA RAPAT:

Ulang tahunnya panjang.

Dari PPP? Ulang tahun juga? Lagi Raker. Nanti dicatat yang hadir. Silakan Pak Andreas.

F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Terima kasih.

Jadi saya menggunakan hak bicara sebagai Kapoksi, melengkapi apa yang disampaikan terdahulu oleh Prof. Hendrawan.

Jadi yang pertama, sebetulnya tujuan tadi saya apa yang disampaikan Prof. Hendrawan, saya memperjelas, sebetulnya tujuan kita melakukan laporan akuntabilitas dan kinerja tahun 2022 itu sebetulnya untuk Bapak juga menyampaikan apa *sih* sebetulnya hambatan-hambatan *milestone* yang ada, supaya itu bisa diatasi di tahun 2024. Ini yang kita bicara masalah RAPBN 2024 Pak, selain pencapaian tentu itu kita apresiasi, tetapi *what next* itu lebih

penting karena setelah itu kita akan membicarakan mengenai RAPBN 2024 ya. Jadi itu catatan yang pertama, sehingga dengan demikian proses ini ya sebetulnya ini kan harus sudah selesai di awal ya Agustus, tapi ini kita agak berbarengan.

Yang kedua, saya lebih fokus tadi supaya karena sebelumnya disampaikan oleh Prof. Hendrawan, BPKP ini. BPKP ini saya kira kalau ini memang perlu Bapak jelasin Pak apa itu mengenai menurut saya ini keren ini, anggaran dibandingkan dengan apa yang dihasilkan. Ya ini tapi saya ini perlu diperjelas ini apakah yang disebut dengan *value creation* atau dari ini supaya jelas begitu dan kalau ini bisa jadi, ini bisa menjadi model bagi yang lainnya, sehingga Bapak boleh saja ngajuin anggaran di sini, tapi nilai tambahnya berapa ya? Jadi ini ini pendekatan yang penting, tapi Bapak mungkin perlu jelaskan cara *ngitungnya* segala macam seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Siti. Saya juga mau di catatan ini, ini tapi ini satu model yang bisa dipakai sebagai katakanlah *value creation*, jadi lembaga minta ini, tapi apa yang akan dihasilkan ya.

Nah dalam hal ini Pak, saya memang mengikuti apa yang dilakukan oleh BPKP selama masa kepemimpinan Bapak dan bahkan ini dijadikan disertasinya Pak Supit karena saya waktu itu hadir di dalam sidang disertasi beliau. Memang banyak hal yang dilakukan dan Bapak men-*stress* organisasinya sedemikian rupa, tetapi tentu ada limitnya Pak, sehingga saya agak terganggu *nih* Pak mungkin bisa dijelaskan juga, tahun 2022 Bapak sampai defisit, nah ini defisit operasional ini Pak. Nah, ini mungkin dijelaskan, saya terganggu *nih* ada defisit operasional, terus pertanyaannya loh kalau defisit itu mungkin kata defisit itu bagaimana? Apakah Bapak mengurangi kegiatannya atau bagaimana atau Bapak tombokin dari?

Nah, pengertian ini perlu dijelaskan Pak, tapi intinya bahwa sebetulnya Bapak sudah *stress* organisasinya sedemikian rupa ini Pak, dan ini nanti tidak atau kurang sehat nantinya, terutama di dalam memenuhi *service level standart*-nya Pak pelayanan. Nanti pasti ada yang dikorbanin itu, itu maksud saya, sehingga dengan demikian ini mohon juga dijelasin untuk supaya kita di dalam nanti membahas RAPBN 2024 ini jelas, masa lembaga melakukan operasionalnya defisit begitu ya, terus bagaimana? Ini kalau saya baca ini ada laporannya defisit satu koma sekian begitu ya, kalau saya tadi langsung agak kaget ini defisit 1,462 miliar ini di laporan operasional *nih* ya, ini ya, ini kan bahasa-bahasa ini supaya lebih diperjelas begitu ya.

Dan yang ketiga, memang apa yang dilakukan termasuk Bapak mau mensinergikan APIP, menurut saya ini adalah langkah strategis, Bapak memang telah mengadakan pameran bahkan di waktu itu di apa istilahnya Taman Mini ya, tetapi *what next*-nya apa ini Pak? Karena justru di situ ya apakah Bapak masih harus memiliki payung hukum yang lebih kuat atau dengan yang ada sekarang ini apa yang bisa lebih ditingkatkan? Karena sinergi ini memang sangat-sangat diperlukan Pak dengan istilahnya itu beban pekerjaan yang selama ini begitu banyak.

Terus sinergi berikutnya saya kira ini saya juga langsung menghubungkan kepada LKPP ini Pak. Kita tahu kan sebetulnya dari banyak temuan itu, salah satu yang memang selalu katakanlah mengganggu dan juga selain tadi yang disebutkan Prof. Hendrawan masalah sentralisasi pengadaan, tetapi juga banyaknya pejabat daerah yang kena OTT karena ini, ya kan? Karena itu kita menunggu *nih* Pak Hendy yang mengenai rancangan undang-undang mengenai pengadaan barang dan jasa itu sampai sejauh mana? Ya ini karena kalau itu memang tadi Prof mengatakan apakah ini akan mencapai visi ya yang tadi disampaikan Gus Dur tadi, ini akan tergantung dari undang-undang ini. Kalau perlu sebelum ini Bapak kasih *item-item* mana apakah yang sesuai atau belum dan kalau misalnya undang-undang ini nanti disetujui ya, itu Bapak sampaikan saya butuh anggaran sekian, tapi saya akan menciptakan *value creation* sebesar ini. Nah, tadi kan Prof mengatakan dari katakanlah sentralisasi pengadaan laptop saja bisa melakukan penghematan 1,8 triliun dan tentu ini akan mengurangi juga korban-korban yang tadi *enggak* OTT seterusnya itu Pak. Ya itu dari satu *item* saja tadi yang disampaikan, belum yang lainnya.

Jadi menurut saya nanti dari hasil katakanlah potretnya Pak Ateh tadi, bagaimana menghitung *value creation* bisa dijadikan model untuk istilahnya lembaga-lembaga yang lain. Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Andreas.

Terakhir Ibu Puteri. Ibu Puteri.

F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDIN, B.Com.):

Mbak, *enggak* mau jadi ibu-ibu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Pak Amir yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, *insya allah* rezekinya berlimpah ruah,
Anggota Komisi XI,
Pak Bahtiar beserta seluruh jajaran,
Bu Amalia beserta seluruh jajaran,
Pak Hendy beserta seluruh jajaran,
Warga Purwakarta, saya lebih sering ketemu Pak Ateh sekarang di Purwakarta Pak daripada di BPKP, jadi *wilujeng sumping* Pak di DKI Jakarta,

Saya langsung saja Pak Amir, *gak* boleh bertele-tele. Jadi yang pertama, terkait dengan kementerian dan lembaga di bawah Pak Presiden Jokowi, kemarin beliau sempat menyatakan bahwa kita harus terus memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri setiap belanja pengadaan

dan beliau juga menyampaikan setiap pembelian 400 triliun produk dalam negeri bisa berdampak dalam serapan tenaga kerja sampai 2 juta pekerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 sampai 1,8%, tapi kita tahu banyak kementerian/lembaga yang mengeluhkan bahwa penggunaan produk dalam negeri ini tidak semudah seperti apa yang kita rencanakan, selain harganya juga yang masih tidak kompetitif, secara kualitas juga masih kurang, dengan berbagai keluhan lainnya.

Jadi kita sangat berharap ada sekitar lebih dari 1.000 triliun anggaran untuk pengadaan setiap tahunnya dari pemerintah pusat dan daerah, jadi tentu ini jumlah yang sangat besar apabila bisa kita serap dalam komponen dalam negeri sebesar-besarnya, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja dan bisa dirasakan dampaknya terhadap Masyarakat, karena tadi pagi kita sudah membahas bersama Bu Amalia betapa jauhnya ketimpangan antara kota besar dan kota-kota yang terpencil dan masih terluar di Indonesia, sehingga kita sangat berharap apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan tadi bisa direalisasikan oleh Pak Hendy khususnya dari LKPP dan mungkin nanti bisa ditambahkan juga Pak kepada kita seperti apa PDN secara total sampai dengan tahun 2022 kemarin dan juga berapa besar porsi penggunaan PDN dalam belanja pengadaan masing-masing instansi pada tahun 2022.

Dan tentu kenapa saya angkat persoalan produk dalam negeri ini di awal, karena tentu bukan hanya tugasnya Pak Hendy, tapi juga menjadi tugasnya Pak Ateh sebagai pengawas BPK juga sebagai instansi pemeriksa dan juga tentunya efek ekonominya nanti bisa dihitung oleh BPS tentunya. Jadi kita sangat berharap sinergi antara ketiga lembaga yang ada di depan saya ini BPKP, LKPP dan BPK terkait dengan dorongan untuk pengembangan produk dalam negeri dan kira-kira apakah mungkin di tahun-tahun terakhirnya Bapak Presiden ini kita bisa melompat dalam hal produk dalam negeri ini, karena berulang kali dari tahun 2014 beliau pertama menjadi presiden, beliau selalu mendorong penggunaan produk dalam negeri. Jadi setidaknya sebagai partai koalisi tentunya kita sangat ingin melanjutkan *legacy* ini nantinya begitu, kepemimpinan yang akan datang dan tentu perbaikan apa yang kira-kira bisa kita dorong dari segi lembaga dan kementerian tentunya supaya ini bisa ada solusinya yang konkret untuk periode yang akan datang.

Dan yang berikutnya terkait dengan BPS. Saya sangat berharap akan segera dilantik Bu jadi kepala definitive karena BPS ini sangat penting sampai tadi senior saya Bapak Misbakhun, Beliau juga inginnya di awal sebenarnya BPS ini untuk presentasi seperti yang tadi. Jadi kita ingin juga dengar hasil dari Sensus Penduduk 2020 yang *long form* dan juga pendataan awal Regsosek, karena pada saat Pak Margo masih bertugas, beliau juga sempat mendorong adanya basis hukum terkait dengan satu data kependudukan yang nanti bisa dipakai untuk basis data distribusi bantuan sosial yang tentu selama ini masih banyak carut-marut dan menimbulkan banyak persoalan di antara masyarakat.

Jadi yang kita ingin dengar adalah apakah sensus yang sudah Ibu lakukan dan juga Regsosek dan lain-lainnya sudah bisa dikordinasikan

dengan Kementerian Sosial ataupun kementerian lainnya yang terkait dan apakah sudah bisa dipakai menjadi salah satu data acuan yang nantinya bisa menghilangkan unsur ketidakpercayaan masyarakat terkait dengan permasalahan distribusi bantuan ini? Karena dengan jumlah bantuan sosial yang sudah sangat besar sekian ratus triliun tiap tahunnya kita gelontorkan untuk Perlinsos, tapi ketimpangan di antara masyarakat akhirnya malah meningkat walaupun tidak signifikan dan masih banyak setiap kita balik ke kampung halaman kita masing-masing ke Dapil masing-masing, masyarakat yang merasa belum pernah sama sekali tersentuh oleh bantuan pemerintah. Jadi tentu kita sangat berharap apa yang telah dilakukan BPS nanti bisa menjadi salah satu *breakthrough* dari presidensi Pak Jokowi ini yang sekarang. Demikian Pimpinan.

Terima kasih atas waktunya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Teman-teman Anggota Komisi XI atas masukan, pandangan juga termasuk beberapa pertimbangan yang disampaikan kepada mitra kita pada hari ini dan selanjutnya saya berikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban secara singkat saja. Kalau jawaban utuhnya nanti melalui tertulis saja. Jadi secara singkat saja. Saya mulai dari Pak Sekjen, Pak Bahtiar silakan.

SEKJEN BPK RI (Dr. BAHTIAR ARIF S.E., M.Fin., Ak., CSFA, CPA, CFA):

Baik, terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat.

Terkait dengan masukan, pertanyaan, dan arahan Terkait Laporan Keuangan BPK Tahun 2022 dan juga capaian kinerja, kami mengucapkan terima kasih atas usulan-usulan dan arahan yang terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan BPK agar lebih baik. Terutama tadi Prof untuk klasifikasi temuan mana yang signifikan, sehingga kita konsentrasi pada hal-hal yang signifikan dan juga untuk kemanfaatan tadi Prof. Hendrawan juga Pak Gus Irawan, kemanfaatan hasil audit ini kami sedang dalam Renstra BPK 5 tahun ke depan ini untuk mengukur manfaat hasil pemeriksaan BPK sejak dari *planning* sampai dengan nanti hasilnya terukur, serta untuk memulai pemeriksaan kinerja, meningkatkan pemeriksaan kinerja, khususnya untuk mengukur prestasi kerja sebagai informasi tambahan dari laporan keuangan.

Demikian juga terkait dengan perbaikan tata kelola yang harus semakin baik, terus kami akan tingkatkan dan juga untuk data-data *outlook* serta hambatan-hambatan yang akan kami hadapi dalam pelaksanaan anggaran yang nanti juga untuk berguna untuk *outlook* di tahun berikutnya dan yang tidak dapat ditindaklanjuti betul Pak Hatari memang masih ada

karena ada perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan organisasi, sehingga tidak ada kejelasan siapa yang menindaklanjuti kembali dan tentunya yang tidak ada nilai kerugian negaranya. Kalau ada nilai kerugian negaranya pasti harus ditindaklanjuti sampai dengan selesai dan demikian juga untuk peningkatan pemeriksaan kinerja dan untuk mendorong entitas agar menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK akan dilakukan advokasi karena kami juga memiliki program pemantauan tindak lanjut dan juga untuk pemeriksaan pendapatan tentu ini menjadi bagian dari rencana pemeriksaan BPK dan juga terkait dengan eksploitasi sumber daya dan juga pemeriksaan yang terkait pengadaan barang dan jasa tentunya konsentrasi terhadap penggunaan produk dalam negeri Bu Puteri.

Ini juga akan menjadi bagian dari konsentrasi yang akan dilihat oleh teman-teman auditor dalam proses pengadaan barang dan pemeriksaan pengelolaan barang dan jasa. Demikian barangkali dari kami.

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang terhormat.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Lanjut dari Kepala LKPP, silakan.

KEPALA LKPP (HENDRAR PRIHADI):

Terima kasih Pimpinan. Saya coba jawab mulai dari Prof. Hendrawan. Prof, di tahun 2023 ini selain laptop kita sudah konsolidasi pengadaan untuk pupuk, Alkes, *kids stunting* di BKKBN, kemudian di pertengahan Agustus kemarin di Provinsi Jawa Tengah untuk pakaian seragam. Itu kalau ditotal potensinya ada 1,69 triliun. Nah, yang berikutnya yang sedang berjalan hari ini Prof, ada akomodasi hotel, kemudian ada teman-teman KPU persiapan 2024, kemudian ada aspal Buton dan juga kebutuhan BBM TNI. *Insyallah* nanti akan kita teruskan yang lainnya.

Dari senior, Mas Misbakhun terkait dengan *server* maupun sistem yang canggih, anggaran kita memang belum bisa, tapi lewat Perpres 17 Tahun 2023 yang itu sudah dimulai dari zaman Pak Anas waktu itu, muncullah penugasan Telkom untuk membantu LKPP membuat sistem *e-catalog* dengan *new platform* dan sekarang ini sedang berproses. Kalau tadinya targetnya September, perundingan terakhir dengan Telkom kemarin mundur sampai Desember untuk *launching* awal, di mana itu nanti sekaligus untuk *payment*-nya kita sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan juga.

Untuk Gus Irawan, terima kasih *support*-nya Gus Irawan *nggih, enggak* ada pertanyaan.

Pak Hatari, ada satu temuan dalam proses ya, tapi per hari ini *insyallah* sudah selesai karena kita tinggal menunggu surat peringatan kepada

salah satu teman kami ...(suara tidak jelas) dan yang hari ini sudah diselesaikan.

Dari Demokrat tidak ada pertanyaan. Dari PKS juga tidak ada pertanyaan.

Pak Andreas, RUU Pengadaan Barang Jasa Publik hari ini sedang dalam proses harmonisasi di Dirjen Kumham. Kami juga sudah mendapatkan info dari Baleg bahwa kita ditunggu sampai sebelum tanggal 20 September, *Inshaallah* ini sudah sudah pada titik *fix*, tinggal menunggu surat tanda tangan Pak Presiden.

Dalem? Iya, iya, iya Pak, tapi memang yang hari ini sudah yang terakhir harmonisasinya ya.

Mbak Puteri, untuk PDN di 2022 sebenarnya tadi sudah saya tayang, perlu ditayang lagi Mbak Puteri? Oh boleh. Teman-teman mohon bisa ditayang *output* daripada LKPP di tahun 2022.

F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Pimpinan, Pimpinan,

Interupsi sebentar Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan Pak Andreas.

F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Yang tadi yang pertanyaan kedua Pak yang mengenai Bapak untuk pembahasan RAPBN 2024, tolong berikan skenario kalau pelaksanaan UU tersebut terjadi itu berapa yang diperlukan begitu Pak? Karena jangan sampai kemudian kita nanti termasuk trilateralnya itu hanya melihat bahwa tahun ini sekian, tahun depan sekian begitu, kalau dibandingkan *outlook* 2023 padahal kan sebetulnya sesuai dengan penugasan yang ada di dalam undang-undang pelaksanaan itu kan sangat berbeda begitu.

KEPALA LKPP (HENDRAR PRIHADI):

Ya siap Pak Andreas. Kita belum menghitung secara spesifik, tapi kebutuhan paling utama tentu saja adalah mensosialisasikan RUU undang-undang tersebut, ini harus bisa sampai ke pelosok, 500 sekian pemerintah kota/kabupaten, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga. Per hari ini saja Pak Andreas, masih banyak kawan-kawan yang belum paham untuk pemakaian *e-catalog*. Jadi saya rasa kalau memang Teman-teman Komisi XI bisa *men-support* kami, itu langkah-langkah untuk bisa mensosialisasikan baik undang-undang pengadaan barang jasa publik, maupun kebijakan yang lain kami sangat perlukan begitu, ya, ya Bu Indah.

Mbak Puteri ini gambarannya kurang lebih begini Mbak Puteri di tahun 2022. Jadi memang realisasi produk dalam negerinya itu masih 76%, tapi *insya allah* ini di tahun 2023 ini sudah mulai meningkat, realisasi UMKK-nya juga sudah mencapai 36,1%. Di 2022 ada 12.00 triliun, estimasi 1.200 triliun RUP-nya. Jadi 76% dari proses pengadaan itu memakai komponen produk dalam negeri, gitu Mbak Puteri. Siap ya Mbak? *Nggih* terima kasih.

Terima kasih pimpinan

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kepala anu Plt. Kepala BPS dulu, silakan Bu.

Plt. KEPALA BPS (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Untuk Prof. Hendrawan, terima kasih Bapak atas atensinya dan tentunya untuk koordinasi dengan DTKS akan teruskan upayakan. Memang Regsosek ini akan nantinya rencananya akan menjadi acuan Pak untuk menentukan dan lebih, lebih merencanakan program-program bantuan yang lebih tepat sasaran dan rencananya sekaligus dengan Bu Puteri bahwa Regsosek ini dalam waktu dekat akan dimanfaatkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan juga oleh Kementerian Keuangan Pak untuk nanti merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih *targeted* dan juga tentunya nanti K/L-K/L lain ataupun masyarakat lain yang ingin memanfaatkan Regsosek itu dimungkinkan dengan ada tata kelola yang nanti akan ditetapkan oleh Permen dan selanjutnya akan ditetapkan oleh Perpres.

Kemudian untuk Pak Gus Irawan Pasaribu, tentunya data yang kami hasilkan dan juga data yang kami miliki kami dorong untuk dimanfaatkan seluas-luasnya oleh pemerintah dan masyarakat. Kami sudah memiliki kebijakan PNPB 0% Pak sejak tahun 2019. Jadi ada data-data yang tidak perlu berbayar dan di tahun 2022 ada Perka baru yang *me-review* PNPB 0% ini dan sudah banyak data yang memang tidak dikenakan biaya untuk dimanfaatkan, hanya ada beberapa data mikro saja yang masih perlu untuk berbayar dan itu pun tidak mahal Pak. Jadi ini kami ingin mendorong pemanfaatan seluas-luasnya, terutama untuk *evidence based policy making* dan juga untuk akademisi dalam melakukan penelitian.

Pak Dr. Hatari, memang kenaikan anggaran untuk BPS yang signifikan ini sejak tahun 2022 adalah untuk Regsosek Pak Rp3,3 triliun dan tahun 2023 itu alokasinya memang ada pekerjaan besar sensus pertanian 2023 yang memang memerlukan anggaran yang cukup besar. Kemudian untuk putusan-putusan hukuman, tentunya nanti akan kami sampaikan secara tertulis Pak dan ada satu temuan yang memang tadi Bapak sampaikan bahwa yang bersangkutan itu sebelum sebelum ada temuan BPK, beliau setelah ada temuan BPK beliau kemudian dijatuhi putusan hukuman dan yang

bersangkutan sudah membayar secara materi maupun nonmateri, yang lainnya nanti akan kami sampaikan secara lengkap secara tertulis.

Bu Puteri terima kasih juga atas atensinya untuk BPS Bu. Untuk hasil Survei Penduduk 2020, itu menjadi acuan penting Bu terutama pada saat pemerintah menyusun visi Indonesia Emas 2045, terutama untuk menentukan periode bonus demografi, kemudian berapa jumlah penduduk nanti di tahun 2045 dan bagaimana kita merancang program-program yang lebih baik itu menjadi manfaat yang luar biasa pada saat proses perencanaan.

Selanjutnya BPS tentunya siap untuk terus mendukung Pemerintah terutama dalam penyusunan perencanaan dan penyusunan anggaran yang lebih baik dan tentunya Bapak dan Ibu sekali lagi kami terima kasih atas dukungan dan atensi kepada BPS dan kami terus siap untuk mendukung *evidence based policy* maupun kebutuhan data dari masyarakat, sehingga nanti masyarakat pun menjadi masyarakat yang paham data dan berbicara ataupun menganalisis juga berbasis data.

Terima kasih Pak dan jawaban lengkap akan kami sampaikan secara tertulis. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Amalia.

Terakhir dari Kepala BPKP, silakan Pak Yusuf Ateh.

KEPALA BPKP (Dr. MUHAMMAD YUSUF ATEH, Ak., M.B.A., CSFA., CGCAE., CIAE.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang terhormat,

Pertama-tama, izinkan kami mohon maaf Pak atas keterlambatan, karena barusan ada Rakernas Inflasi Daerah di Istana dengan Pak Presiden dan kita hasilnya luar biasa Pak 3% inflasi kita, di seluruh negara kita *tuh* Nomor 4. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Gubernur BI dan Pak Presiden dan ini juga terkait sama TKDN, disebut juga karena peningkatan pembelian dalam negeri impor kita menjadi lebih sedikit. Jadi saya kira program-program pemerintah selama ini sudah mulai mendapatkan hasil yang terkait dengan pertanyaan Mbak Puteri tadi yang memang target kita 2 tahun yang lalu dan ini sudah berjalan dengan baik.

Nah, kemudian kami juga ucapkan terima kasih ini Pak Misbakhun, Pak Pimpinan semua mengizinkan saya agak terlambat ini. Saya memang agak sulit karena suka sering ikut di rapat di Istana karena sebagai auditor presiden. Jadi izinkan saya menjelaskan sekali lagi tentang makna kontribusi keuangan negara kita yang BPKP tahun kemarin seribu 117 triliun tadi Pak

Hidayatullah sampaikan. Ini kami bagi tiga kelompok, ini tidak bermakna semuanya masuk keuangan negara.

Yang pertama kami sebut efisiensi pengeluaran negara dan daerah. Jadi ini seluruh Indonesia, yang ini maknanya uangnya belum keluar, tapi bisa kita cegah. Jadi misalnya pembayaran PSN-PSN Pak, kereta api cepat, yang tadi tagihannya 21 triliun, kita korting 7 triliun, LRT, MRT, waduk, jalan tol segala macam itu semua PSN sebelum dilunasi oleh Pemerintah, tagihannya harus kami evaluasi. Nah, ini jadi ini penyelamatan yang riil ini, artinya uangnya tidak jadi keluar karena tagihannya kita koreksi menjadi lebih kecil. Jadi memang tetap di dalam uang itu.

Nah, yang bagian penyelamatan keuangan negara daerah ini adalah uangnya sudah keluar Pak, uangnya sudah keluar, kami audit investigasi, ternyata kelebihan dan sebagainya, tapi tentu Bapak tahu kami BPKP tidak punya kewenangan untuk menagih kembali, ada yang masuk pengadilan misalnya begitu Pak, jadi itu nanti di bagian Kejaksaan segala macam, kami hanya sampai penemuan bahwa ini ada kelebihan, ada koreksi dan sebagainya. Jadi kalau yang 31,01 triliun ini uangnya sudah keluar, belum tentu dapat sekian ini, biasanya bisa dapat semua, bisa juga tidak gitu sebagian. Jadi tidak tidak tidak benar-benar masuk uang negara.

Nah, yang menarik ini yang tadi disampaikan Pak Hidayatullah tentang optimalisasi penerimaan negara dan daerah. Betul Pak potensi kita lebih besar Pak, optimalisasi penerimaan ini termasuk kami dibantu daerah untuk meningkatkan OPD-OPD-nya apa namanya pendapatan asli daerah PAD-nya, itu ada berapa daerah, cuma masalahnya Pak dalam proyek NPP BPKP tidak bisa masuk langsung tanpa diminta oleh kementerian yang terkait atau Menteri Keuangan. Jadi nah pas ...(suara tidak jelas) ini, kami masuk di kemarin Pak Menteri SDM minta kami untuk mengenai PNBPN tambang, banyak kami masuk. Ada daerah-daerah yang minta dibantu oleh kami untuk meningkatkan PAD-nya, baru kami bisa masuk Pak, tapi kalau kami masuk sendiri tidak bisa. Sebenarnya potensinya masih banyak Pak, di Perhubungan, di mana segala macam. Itu memang benar Bapak di Kehutanan *tuh* banyak sekali yang sebenarnya bisa digali kalau memang kami, cuma kami kalau menterinya tidak meminta kami untuk itu, kami tidak bisa apa-apa karena seperti saya laporkan dulu BPKP ini sangat terbatas kewenangannya Pak.

Jadi makanya angkanya bisa kecil bisa besar tergantung ada permintaan dari kementerian atau daerah yang bersangkutan, kecuali perintah dari Pak Presiden Pak. Kenapa makin besar, karena memang makin banyak yang dibuka oleh Pak Presiden untuk kita masuk. Jadi itu itu menyebabkan kita bisa masuk lebih banyak ke dalam apa namanya kegiatan di kementerian/lembaga/daerah, itu yang saya bisa jelaskan Pak.

Jadi makanya tahun 2002 banyak karena banyak PSN-PSN yang jatuh tempo yang sudah selesai. Mungkin 2023 ini akan banyak lagi Pak, akan banyak lagi karena kan harus selesai PSN. Begitu selesai mau dibayar lunas, kami diminta oleh Pak Presiden untuk melakukan evaluasi terkait

pembayarannya. Itu yang bisa kita sampaikan di dalam kontribusi keuangan di negara/daerah.

Kemudian memang tadi yang pertanyaan Pak Andreas ya mengenai *value creation*. Sebenarnya saya sudah berkali-kali minta memang kalau anggaran kami laporkan sekali lagi Pak, sejak tahun 2020 saya masuk itu, kami selalu minta tambahan 200 miliar Pak untuk kegiatan pengawasan dan selalu diberi Pak, cuma selalu minta yang saya dari awal sudah masukkan saja tambahkan di APBN sudah pasti kurang kan begitu, tapi tapi Bapak semua *alhamdulillah* saya terima kasih dukungan Komisi XI selalu menyetujui, tapi tidak keluar-keluar begitu kan itu saja.

Nah, jadi saya masih ingat Pak Misbakhun nasehatnya kepada saya, sudahlah makanya saya *enggak* minta-minta tambahan lagi Pak saya, ya tapi dapat selalu Pak, tahun ini kami baru saja dapat Juni kemarin 150 miliar Pak dan *enggak*, ke Bu Menkeu Pak ya itu sambil ke Presiden saya bisik Presiden. Jadi selalu minta, sudah pasti kurang Pak, Pak Andreas, karena memang kegiatannya banyak. Kami itu selalu dapat tambahan pekerjaan Pak. Ini tahun ini misalnya sawit yang seluruh Indonesia itu besar sekali Pak nanti penerimaan negara. Kami masuk tim gabungan, tapi kami *enggak* minta tambahan apa apa namanya anggaran.

Misalnya Pak PU Pak, Pak Menteri PU itu seluruh proyek beliau itu minta dikawal Pak se-Indonesia Pak. Beliau *enggak* mau ada masalah gitu kan. Kemudian katakanlah BUMN-BUMN itu Pak sekarang hampir setiap hari direksi itu datang, karena setiap aksi korporasi minta kami kawal, makanya kami tidak pernah tambahan anggaran, tapi kami secukupnya saja memang ada kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk mengefisiensikan Pak. Jadi misalnya masuk ke daerah jangan ada judulnya tiga kali, empat kali masuk, sekalian kumpulin baru masuk. Memang ada beberapa langkah yang kita lakukan.

Memang tentu agak sedikit kurang dalam, waktunya terbatas ya Pak ya, tapi *enggak* apa-apa lah, masih bisa kita lakukan. Saya *sih* sudah sampaikan sama anak-anak, sudah kerjakan saja selama anggaran masih ada, kalau *enggak* ada kita berhenti saja saya bilang, tutup saja sementara begitu ditutup BPKP karena kurang anggaran begitu, karena kan kami kan *enggak* ada proyek sebenarnya. Jadi mungkin karena uangnya kecil dan tidak ada proyek, makanya susah sekali dapatnya kan. Kami kan cuma minta tambahan. Kalau auditor kan harus ke lapangan kan Pak, itu saja seperti biayanya Pak. Kalau yang lain-lainnya kami cukuplah Pak begitu kan. Artinya tidak ada masalah.

Jadi Pak Andreas, memang kalau di sektor publik, kalau di laporan operasional pasti negatif Pak karena tidak ada penerimaan. Nah, ini negatif itu lah yang Bapak kasih ini sekarang ini, negatifnya 1,5 (suara tidak jelas) itulah yang Bapak-Ibu kasih di dalam anggaran. Jadi itu yang yang ingin kami sampaikan Pak.

Jadi tadi yang Pak Hidayatullah, kalau kami diberi mandat untuk membenahi optimalisasi penerimaan negara untuk meningkatkan, kami *insya allah* banyak Pak yang bisa kita tambahkan karena kami sudah, sudah identifikasi sebenarnya, cuma kan peraturan PP-nya itu seperti itu Pak, kalau diminta keuangan atau oleh kementerian yang bersangkutan. Jadi ini sangat bergantung kepada Ibu-Bapak Menteri yang ingin menaikkan pendapat PNBPNya Pak kan begitu Pak.

Jadi kemudian yang lainnya Pak, saya kira seperti pertanyaan Pak Hatari mengenai aset lainnya Pak, itu misalnya aset tak berwujud Pak *software* segala macam itu Pak yang barang rusak segala macam itu, jadi dan juga aset yang dalam proses tidak berwujud, masih belum selesai. Jadi makanya banyak sekali, nanti kami akan sampaikan di dalam laporan tertulis saja supaya lebih jelasnya Pak.

Nah kemudian Bapak-Ibu sekalian, yang berikutnya mengenai pengawalan kami terhadap pada inflasi daerah kenapa kami diundang, karena kami mengawal Tim Pengendalian Inflasi Daerah di seluruh Indonesia. Nah, ini juga kami tidak bisa masuk, jadi kami sangat bergantung kepada niat baik daripada kepala daerah untuk memperbaiki itu, tapi umumnya sekarang sudah mulai merapat, kami buka *desk* 24 jam. Kami tidak bisa berinisiatif, tadi pertanyaan dari Ibu Siti, Nah, nanti detailnya kami inikan dalam resi belanja juga begitu Bu. Jadi banyak alasan Pemda itu takut nanti takut ditangkap, takut apa begitu loh. Nah, makanya kami dampingi Bu, dampingi. Sebenarnya BPKP terbuka Bu 24 jam bisa konsultasi segala macam cuma didampingi bagaimana supaya tidak salah, kebanyakan alasannya takut.

Enggak, Insyaallah Pak kalau kami dampingi *insya allah* enggak salah Pak, ini biasanya yang yang salah-salah itu memang tidak mau didampingi, bukan tidak mau dampingi, tidak mau didampingi. Jadi kami sebenarnya suka masuk kalau BPK tidak pernah ada penolakan. Kalau kami sudah biasa ditolak jadi (suara tidak jelas) bedanya itu BPK sama. Perjuangan Bu untuk masuk juga, makanya kami BPK perjuangan. Jadi berjuang supaya tidak ditolak.

Saya kira itu saja yang dari saya, yang lainnya mungkin nanti akan kami jawab.

F-P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak., M.M., CA.):

Pimpinan,

KEPALA BPKP (Dr. MUHAMMAD YUSUF ATEH, Ak., M.B.A., CSFA., CGCAE., CIAE.):

Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Agus.

F-P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak., M.M., CA.):

Saya mau, iya ini karena Pak Ateh telat datang, yang belakang-belakang yang dijawabnya, yang kami di depan *enggak*.

KEPALA BPKP (Dr. MUHAMMAD YUSUF ATEH, Ak., M.B.A., CSFA., CGCAE., CIAE.):

Ya, *sorry* Pak.

F-P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak., M.M., CA.):

Tapi *enggak*, sudah dijawab tadi Pak.

KEPALA BPKP (Dr. MUHAMMAD YUSUF ATEH, Ak., M.B.A., CSFA., CGCAE., CIAE.):

Sudah dijawab.

F-P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak., M.M., CA.):

Ada, karena soal *anu* tadi kontribusi ke negara itu.

KEPALA BPKP (Dr. MUHAMMAD YUSUF ATEH, Ak., M.B.A., CSFA., CGCAE., CIAE.):

Iya, iya.

F-P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak., M.M., CA.):

Saya *enggak* tahu apakah apresiasinya tinggi ke penerimaan itu tinggi, lalu saya harus apresiasi tinggi gitu. Saya melihatnya agak terbalik begitu Pak.

KEPALA BPKP (Dr. MUHAMMAD YUSUF ATEH, Ak., M.B.A., CSFA., CGCAE., CIAE.):

Ya.

F-P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak., M.M., CA.):

Tapi ada Bapak jawab tadi bahwa rupanya BPKP itu begitu angka itu sangat tergantung dengan karena Bapak itu kan atas permintaan atau penugasan.

KEPALA BPKP (Dr. MUHAMMAD YUSUF ATEH, Ak., M.B.A., CSFA., CGCAE., CIAE.):

Ya, ya.

F-P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak., M.M., CA.):

Saya kebayang Pak jadinya, padahal atas permintaan dan penugasan pemeriksaan Bapak kan pakai sampel, masih dengan sampel?

KEPALA BPKP (Dr. MUHAMMAD YUSUF ATEH, Ak., M.B.A., CSFA., CGCAE., CIAE.):

Ya, ya, ya.

F-P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak., M.M., CA.):

Sudah begini datanya, seberapa besar lagi sesungguhnya Pak potensi yang kemudian.

KEPALA BPKP (Dr. MUHAMMAD YUSUF ATEH, Ak., M.B.A., CSFA., CGCAE., CIAE.):

Ya sama Pak pikirannya.

F-P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak., M.M., CA.):

Nanti lah Pak, saya kira kalau nanti di depan ya saya kira kalau sudah Prabowo presiden, kita tugaskan Bapak itu semua begitu.

KETUA RAPAT:

Ya kalau, kalau ya.

Oke, Pak Yusuf Ateh ini sudah bisa menjawab semua, sekalipun ...(suara tidak jelas) hebat ini.

Jadi masih ada Gerindra ya?

F-PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIA):

Pimpinan, mohon izin menambahkan dua menit saja.

Telah disampaikan oleh Pak Ateh tadi, saya baru ingat bahwa Pak Ateh beberapa kali berjumpa dengan kami itu selalu curhat, jadi masalah anggaran yang tadi hanya 200 miliar, 150 miliar begitu ya. Nah, saya, saya terinspirasi oleh pertemuan pada sore hari ini bahwa di depan kita ini ada lembaga, empat lembaga, BPKP, kemudian LKPP, BPK, BPS, ini adalah lembaga yang benar-benar sangat vital peran dan fungsinya dengan anggaran yang relatif juga minim, tetapi fungsinya sangat luar biasa. Untuk itu akhir-akhir ini yang sering kita dengar adalah kata literasi atau pemahaman.

Tadi BPS, Ibu BPS mohon maaf saya belum mengenal namanya Ibu, Ibu Amalia, Ibu Amalia menyampaikan bahwa butuh masyarakat yang cerdas, data. Jadi kecerdasan atau pemahaman itu kita butuhkan saat ini *plus*

kolaborasi. Jadi kalau dua kata itu kita bisa capai bersama, Bu mohon kami sama posisi DPR RI ini sama, khususnya Komisi XI itu memang kami di daerah pemilihan memang kami kurang populer XI itu Pak, tetapi tugas kita itu sangat penting sekali di sini, mitra-mitra kerja seperti ini, maka mungkin dipikirkanlah mesti seperti misalnya LKPP.

Kalau kita selalu bicara tentang bangga buatan Indonesia, cintai produk Indonesia, UMKM hampir seluruh lembaga kementerian itu semua terlibat untuk pemberdayaan UMKM, tapi sebenarnya LKPP bisa menjadi satu tempat di mana UMKM itu bisa memasarkan atau menempatkan produk-produknya dan itu *e-catalog* pun juga mungkin pemahaman kurang, maka mungkin kita bisa berkolaborasi BPKP dengan kepala desa, kepala daerah, mereka *enggak* pernah tahu loh peran dan fungsi Komisi XI selama ini rapat-rapat kerja sehari-hari khususnya pada masa pandemi pakai *zoom* itu tidak mengenal waktu, *output* kita apa, itu mereka kurang paham. Yang mereka selalu hargai kalau ada Kementerian PUPR datang, BUMN datang, mereka menggeruduk, tapi kalau Komisi XI bisa saja kepala daerah itu pertemuan kami ditinggalkan karena ada menteri di sana, kita tidak ditemui Pak. Itu benar beberapa kali terjadi.

Jadi mungkin lakukan sosialisasi bersama kami. Kami ini menjadi *hub* informasi untuk misalnya pengusaha, pelaku usaha yang mau menempatkan menempatkan mengisi *e-catalog* misalnya, LKPP dengan produknya yang *qualified* ya Pak tentu saja, terus kemudian bagaimana data dari BPS, BPK, BPKP yang bisa menyelamatkan keuangan negara dan seterusnya, sampaikan peran dan fungsi kami ini secara berkolaborasi, mungkin itu bisa akan membuat Indonesia lebih cerdas dan lebih efisien dan lebih efektif.

Demikian Pimpinan tambahan dari saya, konkret, agak sedikit pragmatis.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih. Saya kira itu saran, masukan untuk Bapak-Ibu sekalian dan saya kira terkait dengan jawaban secara lengkap bisa tetap diberikan secara tertulis.

F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Satu saja, mengenai tadi yang disampaikan Pak Ateh sangat penting dan ini sejalan dengan kesimpulan kita tadi mengenai RAPBN 2020 mengenai optimasi penerimaan negara dari penerimaan negara bukan pajak. Jadi kalau tadi Pak Ateh mengatakan baru bisa melakukan kalau ada permintaan, nah berarti tolong disampaikan saja kepada kami Pak potensinya seberapa, nanti kita kan bisa lewat Kementerian Keuangan meminta untuk katakanlah dilakukan ini-ini terhadap terutama yang beli tiket dulu Pak, karena ini sejalan dengan bahwa kita memang optimasi penerimaan negara terutama PNBPN, tadi masuk dalam kesimpulan di dalam APBN kita, RAPBN.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Bapak-Ibu sekalian, para Pimpinan dan Teman-teman Anggota Komisi XI yang terhormat, Pak Bahtiar, Bu Amalia, Pak Hendy, Pak Yusuf Ateh dan seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Kita masuk ke rancangan kesimpulan ya. Coba ditayangkan. Sambil saya bacakan.

Rancangan Kesimpulan
Komisi XI DPR RI Bersama Sekjen BPK RI, Kepala BPKP,
Kepala LKPP dan Pelaksana Tugas Kepala BPS

Menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan tentang Laporan Capaian Akuntabilitas dan Laporan Kinerja Tahun 2022.
2. Komisi XI DPR mengapresiasi capaian Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP BPK, BPKP, LKPP dan BPS untuk APBN Tahun 2022.
3. Sekjen BPK RI, Kepala BPKP, Kepala LKPP dan Pelaksana Tugas Kepala BPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Kantor Akuntan Publik untuk BPK dan BPK dan rekomendasi Komisi XI DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan BPK, BPS dan LKPP dan BPK Tahun Anggaran 2022 serta melaporkan kinerja tidak lanjut tersebut kepada Komisi XI DPR RI.

Selanjutnya,

4. Sekjen BPK akan memperhatikan kinerja dan tidak lanjut mengenai hal-hal sebagai berikut: kenaikan nilai sistem merit; kualitas pengelolaan aset; peningkatan profesional ASN; kualitas pelayanan publik yang semakin membaik; memperkuat pemeriksaan kinerja dan tetap mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan.
5. BPKP dalam menjalankan upaya kebijakan dan program akan diarahkan secara optimal untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan anggaran, pelayanan dan peningkatan informasi pengawasan pembangunan dan keuangan.
6. BPKP dalam menjalankan tugas pengawasan agar ikut memperkuat dan mempertajam kualitas belanja kementerian, lembaga, daerah, badan usaha, spending better pada APBN tahun anggaran selanjutnya yang ditunjukkan dengan belanja yang semakin produktif, menghasilkan multiplier effect terhadap perekonomian dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikator yang terukur.
7. BPKP memperkuat dan meningkatkan pengawasan pembangunan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, mengoptimalkan penerimaan negara, daerah, penyelenggaraan belanja

yang efektif dan efisien dan tata kelola pengawasan yang unggul, akuntabel dan sehat.

8. Kepala LKPP akan memperkuat dan mempertajam kinerja dalam mengembangkan dan merumuskan kebijakan di bidang pengadaan barang jasa pemerintah untuk mendorong perekonomian nasional melalui sosialisasi pengadaan barang jasa pemerintah di pemerintah provinsi, kabupaten, kota.

Mungkin Pak Andreas itu yang dimaksud ya?

9. Kepala LKPP meningkatkan kinerja LKPP yang ditunjukkan dengan kualitas kinerja dalam mencapai hal-hal sebagai berikut:

- 1) peningkatan jumlah katalog

e-katalog maksudnya.

peningkatan jumlah e-katalog dan penggunaan produk dalam negeri secara nasional;

- 2) peningkatan penggunaan produk usaha mikro kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah;
- 3) integrasi pengembangan aplikasi;
- 4) peningkatan tata kelola data dan pengadaan pengadaan nasional yang mendukung kemudahan transaksi dan data analisis;
- 5) *managed service* dalam pengelolaan infrastruktur IT, serta monitoring dan penanganan insiden keamanan informasi.

10. Pelaksana Tugas Kepala BPS akan meningkatkan kualitas data statistik yang digunakan sebagai basis perencanaan, monitoring dan evaluasi bagi pemangku kepentingan.

Ini mudah-mudahan data Regsoseknya segera bisa terpakai Bu, Pak Sestama tadi.

Terakhir,

11. Sekjen BPK RI, Kepala BPKP, Kepala LKPP, dan Pelaksana Tugas Kepala BPS akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI sebelum pelaksanaan rencana kerja pembahasan rencana kerja dan anggaran BPK, BPKP, LKPP dan BPS dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Masih ada yang mau dikoreksi silakan.

Dari Pak Yusuf?

KEPALA BPKP (Dr. MUHAMMAD YUSUF ATEH, Ak., M.B.A., CSFA., CGCAE., CIAE.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Wah, Pak Hendy enggak ada ya? Pak Bahtiar? Bu Amalia?

Teman-teman sudah cukup ya?

Ya, bahasanya itu layanan pengelola.

ANGGOTA KOMISI XI DPR RI:

(suara tidak jelas)

KETUA RAPAT:

Ya, ya, betul.

Dicoret saja. Ya kalau sepakat coret saja *enggak* apa-apa.

F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Tadi dilaporkan oleh LKPP bahwa itu sudah menjadi kesepakatan antara LKPP dengan Telkom pada saat Ketua LKPP yang lalu kan?

KETUA RAPAT:

Sudah ada Perpres sekarang?

Oke kalau sudah ada Perpres *enggak* apa-apa. Paparan tadi *sih* ada, di bahan tadi ada. *Oke*, kalau begitu *enggak* ada masalah ya Pak Misbakhun ya? Yang kesimpulannya kita terima ya?

Terima kasih Bapak-Ibu sekalian.

Saya kira rapat kerja kita hari ini sudah hampir tuntas dan sebelum kita tutup, saya berikan kesempatan apakah masing-masing atau ada yang wakili untuk *closing statement*, silakan. Perwakilan silakan. Pak Ateh, Pak Ateh *nih*.

KEPALA BPKP (Dr. MUHAMMAD YUSUF ATEH, Ak., M.B.A., CSFA., CGCAE., CIAE.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Bukan tua, senior. Jangan cerita tua di sini.

Pak Ateh silakan.

KEPALA BPKP (Dr. MUHAMMAD YUSUF ATEH, Ak., M.B.A., CSFA., CGCAE., CIAE.):

Jadi hari ini saya benar-benar merasa sudah tua ini.

Jadi Pimpinan, Anggota Komisi XI yang terhormat,

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya merasa selama empat tahun ini saya bertugas dukungan luar biasa dari Komisi XI kepada kami. Sekali lagi saya kira kalau mau bisa jadi kenangan manis buat saya, sebelum tahun depan saya pensiun. Coba tahun 2024 itu benar-benar nambah 200 miliar itu saya harapkan itu. Saya kira itu.

Terima kasih Pak semua ya. *enggak* muluk-muluk saya 200 miliar saja ya, jadi tidak harus minta setiap tahun kepada Menteri Keuangan. Saya kira demikian Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Enggak, itu ini harus menjadi catatan karena kemarin-kemarin kalau Pak Ateh minta setelah minta kita *enggak* ketemu lagi, *enggak* tahu mau betulan apa *enggak* begitu. Sekarang betul-betul minta dua kali minta sekarang.

Terima kasih, saya kira atas nama Pimpinan dan Teman-teman Komisi XI menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas rapat kerja dan rapat dengar pendapat kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita simpulkan *insya allah* akan membawa kebaikan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dengan ucapan *alhamdulillahirabbilalamin*, rapat saya tutup. Sekian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.45 WIB)

Jakarta, 31 Agustus 2023

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd

Dr. Anita Handayani Putri, S.T., M.T.
NIP. 198201022005022002